

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	6
D. Sumber Daya Manusia .....	7
E. Sumber Pendanaan.....	7
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	9
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
A. Hasil Pengukuran Kinerja.....	15
B. Analisa Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja .....	16
C. Akuntabilitas Keuangan .....	20
D. Permasalahan dan Solusi .....	26
E. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	30
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintah yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisiensi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan daerah merupakan akumulasi dari rencana kerja SKPD wajib melaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Bagi Pemerintah LAKIP dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Tuntutan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja khususnya menyangkut kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon harus didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pelayanan tepat guna/prima dan profesionalisme oleh aparat Bappelitbangda khususnya, agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif (DPRD Kabupaten Cirebon) terjalin dengan harmonis dan selaras terbentuk hubungan (*check and balance*) yang lebih seimbang.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berkewajiban untuk menginformasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah dilaksanakan sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas untuk menginformasikan terhadap masyarakat.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5); dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

### **TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan pembangunan dan pengendalian pembangunan daerah, kebijakan kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai fungsi :

### **FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

1. Perencanaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik, kerjasama daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik, kerjasama daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
3. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik, kerjasama daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian, dan pengembangan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Badan;
4. Pelaksanaan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;

5. Pemantauan dan penilaian serta pengendalian pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik, kerjasama daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **I. Kepala Badan**

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. perencanaan dan pengendalian anggaran;
- d. pengendalian urusan administrasi Badan;
- e. pengendalian koordinasi dan kerjasama bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya;
- f. pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi:
  - RPJPD;
  - RPJMD; dan
  - RKPD.
- g. pengendalian program penelitian dan pengembangan;
- h. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Badan adalah pimpinan Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan.

## **II. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
  - b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Badan ;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
  - d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Badan ;
  - e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan asset Badan dan UPT;
  - f. pembinaan dan pengembangan pegawai Badan;
  - g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
  - h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Badan dan informasi lainnya terkait layanan publik;
  - i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
  - J. Pengelolaan web site Badan dan profil Badan;
  - k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana kerja Badan.

## **III. Bidang Fisik dan Prasarana**

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja Bidang dan standar perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan dan perdesaan;
  - b. pengkoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
  - c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;
  - d. melaksanakan pengendalian program kegiatan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di Bidang Fisik dan Prasarana;
  - e. melaksanakan pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana;
  - f. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
  - g. menyusun kajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di Bidang Fisik dan Prasarana;
  - h. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Fisik dan Prasarana;
  - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan bidang pertanahan, urusan bidang lingkungan hidup, urusan bidang energi dan sumberdaya mineral; dan urusan bidang perhubungan;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

#### **IV. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
  - b. pengoordinasian penyusunan, dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
  - c. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan pemerintahan dan aparatur;
  - d. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di sub bidang pemerintahan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di pemerintahan;
  - f. pelaksanaan analisis data program pembangunan daerah di sub bidang pemerintahan;
  - g. pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan;
  - h. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di sub bidang pemerintahan;
  - i. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di sub bidang pemerintahan;
  - j. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan dan kegiatan Sub Bidang; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola mengoordinasian, menyusun



rencana, mengelola data, memfasilitasi, mengkaji, mengendalikan, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

## **V. Bidang Ekonomi**

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja Bidang;
  - b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - c. pengendalian program kegiatan musrenban RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang ekonomi;
  - d. pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja SKPD;
  - f. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di sub bidang
  - . pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang ekonomi;
  - h. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang ekonomi;
  1. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidanpangan; urusan bidang pertanian; urusan bidang kehutanan, urusan bidang kelautan dan perikanan; urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan bidang penanaman modal; urusan bidang pariwisata; urusan bidang perdagangan; dan urusan bidang perindustrian;
  - J. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (3) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyusun pedoman, membina, merumuskan, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

## **VI. Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. perurnusan rencana kerja Bidang;
  - b. penyusunan rancangan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang dan evaluasi kinerja RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja renja SKPD;
  - e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
  - f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
  - g. pengoordinasian administrasi kerja saran perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
  - h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan;
  1. pengoordinasian perurnusan kerjasarna pembangunan daerah;
  - J. pengelolaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
  - k. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, provinsi dan prioritas pembangunan daerah;
  - l. pengendalian perencanaan pembanguanaan sesuai kebijakan dan tujuan pembangunan daerah;
  - m. pelaksanaan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
  - n. mengoordinasikan dan mernfasilitasi urusan bidang statistik, dan urusan bidang komunikasi dan informatika;
  - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Bidang Pengendalian dan evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan

## **VII. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja Bidang;
  - b. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervise dan konsultasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
  - d. pengelolaan teknis administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
  - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan rencana kerja SKPD;
  - f. pengkajian hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna;
  - g. pengoordinasian perumusan kerjasama pembangunan daerah di Subbidang;
  - h. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - i. pelaksanaan forum komunikasi publik dan forum satu data pembangunan dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
  - q. pengoordinasian dan memfasilitasi urusan bidang persandian;
  - J. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, meneliti dan mengembangkan teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan dibawahnya 3 (tiga) Kasubbag yaitu Kasubbagian Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan 5 (lima) Kepala Bidang dengan jumlah 12 (dua belas ) kasubid ditambah 1 (satu) Jabatan Fungsional Terdiri dari

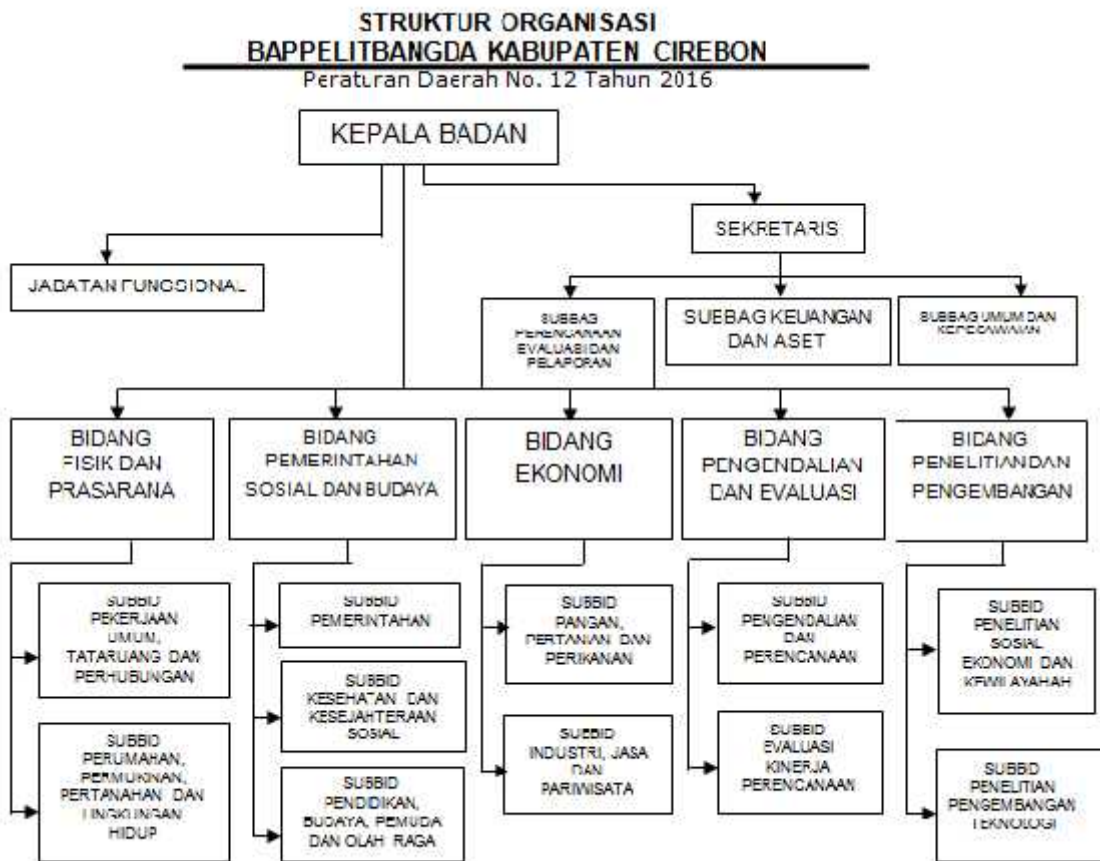
1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan;
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Fisk dan Prasarana, membawahkan;
  - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
  - b. Sub Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingk. Hidup
4. Bidang Ekonomi, membawahkan;
  - a. Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
  - b. Sub Bidang Industri, Jasa dan Pariwisata
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan;
  - a. Sub Bidang Pemerintahan
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  - c. Sub Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan;
  - a. Sub Bidang Pengendalian dan Perencanaan
  - b. Sub Bidang Evaluasi Kinerja Perencanaan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan;
  - a. Sub Bidang Penelitian Sosial, ekonomi dan kewilayahan
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

#### 2.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretariat dengan dibawahnya 3 (tiga) subbag yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, dan subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah subbid 11 (sebelas), serta 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappedalitbangda, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2017, kekuatan sumber

daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 66 orang, terdiri atas 50 PNS dan 16 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 13 orang (26 %) berpendidikan master, 24 orang (48 %) berpendidikan Sarjana, 4 orang (8 %) Sarjana Muda/D3, 7 orang (14 %) berpendidikan SLTA, dan 2 orang (4 %) berpendidikan SLTP/SD sebagaimana Tabel 1. Dari pegawai tersebut 21 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 29 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda adalah salah satu lembaga di tingkat daerah yang pegawainya memiliki latar belakang pendidikan paling bervariasi, terdiri dari teknik (15,15 %), ekonomi (6,06 %), dan sosial (3,03%). Sementara itu, latar belakang keilmuan lainnya meliputi Administrasi Negara; Pemerintahan, Akuntansi; memiliki persentase 39,36 %.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjurangan baik struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

**TABEL 1**  
**PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017**

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)					JML
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
<b>P N S</b>							
1	STRUKTURAL	11	9	1	-	-	21
2	PELAKSANA	2	15	3	7	2	29
<b>JUMLAH PNS</b>		<b>13</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
<b>JUMLAH NON PNS</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>66</b>

#### **E. SUMBER PENDANAAN**

Pada tahun anggaran 2017, realisasi belanja daerah sebesar Rp 13.503.021.748,00 (termasuk belanja pegawai) atau mencapai 91,21 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 14.803.971.100,00. Pagu anggaran untuk program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**TABEL 2**  
**PAGU ANGGARAN TAHUN 2017**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			
		APBD II/PUD	APBD I	APBN	TOTAL
	<b>URUSAN WAJIB</b>				
1	Program Perencanaan Tata Ruang	237.515.000	-	-	237.515.000
2	Program Pemanfaatan Ruang	78.910.000	-	-	78.910.000
3	Program Pengembangan Data/Informasi	1.384.279.400	-	-	1.384.279.400
4	Program Kerjasama Pembangunan	52.228.000	-	-	52.228.000
5	Program Perenc. Pengemb. Kota-kota Menengah dan Besar	350.000.000	-	-	350.000.000
6	Program Perencanaan Pemb. Daerah	2.507.969.700	-	-	2.507.969.700
7	Program Perencanaan Pemb.Ekonomi	762.950.000	-	-	762.950.000
8	Program Perencanaan Pemb. Sosbud	857.260.000	850.000.000	-	1.707.260.000
9	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	200.000.000	-	-	200.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.872.703.000	-	-	1.872.703.000
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	764.652.000	-	-	764.652.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80.000.000	-	-	80.000.000
4	Program Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235.000.000	-	-	235.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.000.000	-	-	44.000.000
6	Program Pengembangan Sistem Perenc.Sektoral	16.500.000	-	-	16.500.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>9.457.967.100</b>	<b>850.000.000-</b>	<b>-</b>	<b>10.307.967.100</b>

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014-2019

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Bappelitbangda mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam di dalam Renstra Tahun 2014-2019. Visi tersebut adalah:

##### 1. Visi Kabupaten Cirebon

Visi Kabupaten Cirebon tahun 2014 -2019, sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang terpilih hasil pemilihan kepala daerah langsung pada tanggal 29 Desember 2013, sebagai berikut :

***“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera”.***

Dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan para pelaku pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, sejalan dengan hal tersebut makan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera adalah sebagai berikut:

**Agamis** : adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengamalannilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

**Maju** : adalah suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna.

**Adil** : adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya

**Sinergi** : adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional



**Sejahtera** : adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tenteram.

## 2. Misi Kabupaten Cirebon

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka di jabarkan dalam Misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan SDM yang ber'akhlak mulia yang berdasarkan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik.
- b) Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.
- c) Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektorral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia.
- d) Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antara berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah, dunia usaha, akademik dan komunitas)
- e) Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.
- f) Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi system birokrasi menuju system berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi yang tertuang di dalam Renstra 2014-2019. Visi tersebut adalah:

### 1. Visi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Pembaharuan dalam perencanaan pembangunan mulai digulirkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu dengan meluncurkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan tersebut menuntut kesiapan dari seluruh aparatur perencanaan di daerah dengan menetapkan langkah-langkah yang sinergis. Guna menyikapi hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan Visinya :

#### ***“BAPPELITBANGDA YANG ASPIRATIF, SINERGIS DAN AKUNTABEL BERBASIS IT TAHUN 2019”***

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka :

Aspiratif : menampung aspirasi perencanaan pembangunan dari masyarakat

Sinergis : aspirasi perencanaan dari masyarakat sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan SKPD lain sesuai dengan tupoksi SKPD

Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang akurat

## 2. Misi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon didukung dengan Misi :

- a) Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama perencanaan pembangunan.
- c) Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT.
- d) Mengembangkan SDM Perencana yang berkualitas.

## 3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bappelitbangda dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2017, sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2017**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1	Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif	Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan aspiratif dari masyarakat.	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD
2	Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama perencanaan pembangunan	Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koord, fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan
3	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT	Meningkatkan akuntabilitas perenc., pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT Tercapainya keselarasan perencanaan	Jumlah system perencanaan berbasis IT Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan prosentase jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja prosentase jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program
4	Mengembangkan SDM Perencana yang kompeten	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi

#### 4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2014 – 2019 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Bappelitbangda. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2014-2019 serta kebijakan internal yang tertuang dalam Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017 yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong kesempatan yang luas kepada semua pihak dalam perencanaan pembangunan yang pro rakyat.
- 2) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih kredibel berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda.
- 3) Mendorong koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengembangan perencanaan berdasarkan tematik kewilayahan dan sektoral.
- 4) Pengembangan SDM dilingkungan Bappelitbangda melalui berbagai diklat untuk menghasilkan SDM yang lebih professional.
- 5) Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis Teknologi Informasi.

Bappelitbangda menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah. Program tersebut terdiri dari program utama (urusan wajib) terdiri dari 3 (tiga) urusan, 9 (sembilan) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan serta urusan penunjang terdiri dari satu urusan, 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Penjelasan masing-masing program adalah sebagai berikut:

##### a. Urusan Wajib

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Bappelitbangda dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Urusan wajib terdiri dari 3 (tiga) urusan, 9 (sembilan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan, yaitu :

##### I. Urusan Penataan Ruang

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
  1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
  2. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
- 2) Program Pemanfaatan Ruang
  3. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

## II. Urusan Perencanaan Pembangunan

- 3) Program Pengembangan Data/Informasi
  4. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  5. Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon
  6. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
- 4) Program Kerjasama Pembangunan
  7. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah
- 5) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
  8. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
- 6) Program Perencanaan pembangunan daerah
  9. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  10. Penetapan RKPD
  11. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
  12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  13. Perjanjian Kinerja
  14. Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD
  15. Evaluasi RPJMD
  16. Penetapan RKPD Perubahan
  17. Penyusunan KUA PPAS
  18. Penyusunan KUA PPAS Perubahan
  19. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
- 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi
  20. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
  21. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
  22. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- 8) Program Perencanaan Sosial budaya
  23. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
  24. Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
  25. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan
  26. Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's
  27. Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG
  28. Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon

### III. Urusan Penelitian dan Pengembangan

#### 9) Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah

29. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan

30. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan

#### b. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan ini dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas-tugas utama Bappelitbangda khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Urusan ini berjumlah 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, yaitu :

##### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

##### 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

##### 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

##### 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
  23. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor

Dari program tersebut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas penunjang. Penjabaran kegiatan tersebut berdasarkan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam Tabel di bawah ini.

**TABEL 4**  
**SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN**

<b>N O</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan aspiratif dari masyarakat.	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp 731,571,000
				Penetapan RKPD	Rp 335,508,300
				Penetapan RKPD Perubahan	Rp 76,490,000
2	Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koord, fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Rp 350,000,000
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 249,000,000
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Rp 202,500,000
				Dukungan manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Rp 258,410,000
			Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Rp 157,585,000
				Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Rp 79,930,000
			Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Rp 100,000,000
				Seminar penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bidang pertanian	Rp 100,000,000
			Program Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat	Rp 78,910,000
			Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	Rp 52,228,000

3	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 983,950,000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rp 260,046,900
		Tercapainya keselarasan perencanaan		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Rp 189,313,500
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi RPJMD	Rp 245,600,000
				Evaluasi AKIP	Rp 125,000,000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelapor	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 44,000,000
			Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Rp 16,500,000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perjanjian Kinerja	Rp 149,442,500
				Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	Rp 167,880,000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan KUA PPAS	Rp 159,047,500
Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Rp 68,070,000				
4	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen	Rp 235,000,000
<b>Jumlah Urusan Wajib</b>					<b>Rp 7.576.612.100</b>
<b>Jumlah Urusan Penunjang :</b>					<b>Rp 2,731,355,000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran :</b>					<b>Rp 10,307,967,100</b>

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2017. Renja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Bappelitbangda 2014-2019, dalam Renja tersebut telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sarannya. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Bappelitbangda tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan Tahun 2017 yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan dibuat perjanjian kinerja dengan Pimpinan dalam hal ini Bupati Cirebon dengan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan anggaran dan pencapaian target-target kinerja di Tahun 2017. Adapun Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada Tabel di bawah ini dan matrik akuntabilitas kinerja.

TABEL 5

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	Pagu Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD	%	80	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,143,569,300	
2	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	Rumusan kebijakan	10	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp 350,000,000	
					Program Perenc. Pembangunan Ekonomi	Rp 762,950,000	
					Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp 1,707,260,000	
					Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 237,515,000	
				dok	1	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	Rp 200,000,000
			Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	keg	1	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 78,910,000
			Jumlah dok. kerja sama daerah yang dihasilkan	dokumen	1	Program Kerjasama Pembangunan	Rp 52,228,000
3	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Jumlah system perencanaan berbasis IT	aplikasi	3	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 1,384,279,400	
		Jumlah dok. evaluasi perenc. pembangunan	dokumen	2	Program Perenc. Pembangunan Daerah	Rp 449,360,400	
	Tercapainya keselarasan perencanaan	Jumlah dok. evaluasi perencanaan pembangunan	dokumen	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 370,600,000	
		prosentase jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dok RKPD dan renja	%	85	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelapor	Rp 44,000,000	
					Prog.Pengembangan Sistem Perenc. Sektoral	Rp 16,500,000	
					Program perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 317,322,500	
		prosentase jumlah dok.perencanaan yang digunakan sebagai acuan peny. program	%	75	Program perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 227,117,500	
4	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jmh aparatur perenc. yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	orang	40	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 235,000,000	
<b>J U M L A H</b>						<b>7,576,612,100</b>	
<b>Jumlah Anggaran Perjanjian Kinerja:</b>						<b>Rp 7,576,612,100</b>	
<b>Jumlah Anggaran Penunjang :</b>						<b>Rp 2,731,355,000</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran :</b>						<b>Rp 10,307,967,100</b>	



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2017 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Pencapaian kinerja Bappelitbangda tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappelitbangda menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- 1) Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan aspiratif dari masyarakat;
- 2) Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT;
- 4) Meningkatnya kompetensi aparatur perencana.

Tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Bappelitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rancangan rencana pembangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Dari kelima tujuan dan tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Bappelitbangda untuk tahun 2017 adalah pada Tabel di bawah ini.

**TABEL 6**  
**HASIL PENGUKURAN KINERJA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Tercapai / Tdk Tercapai
1	2	3	4	5
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masy. Dalam perenc. pembang.	Prosentase akomodasi usulan musrenbang dalam RKPD	80 %	97,77 %	TERCAPAI
Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pemb.	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	10 dok	13 dok	TERCAPAI
	Jml.fasilitasi perenc. yang dilaks.	1 jenis	1 jenis	TERCAPAI
	Jml dok.kerja sama daerah yang dihasilkan	1 dok	1 dok	TERCAPAI
Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Jumlah system perencanaan berbasis IT	3 aplikasi	3 aplikasi	TERCAPAI
	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	4 dok	5 dok	TERCAPAI
Tercapainya keselarasan perencanaan	Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja	85 %	100 %	TERCAPAI
	Jumlah dok.perenc.yang digunakan sebagai acuan peny. program	75 %	100 %	TERCAPAI
Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jumlah aparatour perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	40 org	151 org	TERCAPAI

## B. ANALISA DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

- Tujuan 1 : Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif  
Sasaran Strategis : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.  
Indikator Kinerja : Prosentase terakomodairnya usulan musrenbang dalam RKPD  
*Alat Ukur :*  
*Jumlah Pagu Indikator Kewilayahan (PIK) hasil Musrenbang RKPD berbanding Jumlah PIK yang terakomodir dalam RKPD*

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2017, Bappelitbangda berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah, *telah menghasilkan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2017 yang berkualitas.*

. Rancangan dokumen RKPD 2017 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKPD 2017 yang dimulai dari Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kelurahan), Musyawarah Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Forum Rakor SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten (Musrenbang Kab), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) baik Pra Musrenbang propinsi maupun Pasca Musrenbang propinsi serta rapat-rapat lainnya ditingkat teknis dengan SKPD maupun dengan kecamatan. Selanjutnya rancangan dokumen RKPD 2017 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka pendek atau tahunan.

Hal tersebut bisa dilihat dari usulan hasil musrenbang dari Pagu Indikatif Kewilayah (PIK) yang diusulkan oleh 40 kecamatan pada musrenbang RKPD 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebanyak 74 program, 122 kegiatan dengan sub kegiatan 960, dari jumlah usulan tersebut yang terealisasi sebanyak 938 sub kegiatan atau 97,77 %.

TABEL 7  
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) TAHUN 2017

NO.	SKPD	USULAN PIK	DIAKOMODIR OLEH SKPD
1	40 KECAMATAN	960 sub kegiatan	-
2	20 SKPD	-	938 sub kegiatan (97,77 %)

Rancangan dokumen RKPD 2017 tersebut merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD 2014-2019 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah. Selanjutnya Dokumen RKPD 2017 tersebut menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD 2018

serta penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappelitbangda.

- Tujuan 2 : Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
- Sasaran Strategis : Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- Indikator Kinerja : 1) Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan  
*Alat ukur :  
Hasil rakor yang berisi rumusan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan*
- 2) Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan  
*Alat ukur :  
Fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan*
- 3) Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan.  
*Alat ukur :  
Dokumen kerjasama antar daerah maupun perbatasan*

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka untuk menilai peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan didukung oleh anggaran APBD Kabupaten Cirebon yaitu :

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan yang dilakukan oleh bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang pengendalian dan evaluasi serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan tupoksinya.
- b. Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, dilaksanakan oleh bidang fisik dan prasarana, sedangkan bidang lainnya kegiatan tersebut sudah menyatu dengan rakor dan koordinasi yang rutin dilakukan.
- c. Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dihasilkan adalah 1 dokumen yang terdiri dari dokumen kerjasama Pembangunan Daerah.

TABEL 8  
PROGRAM PENUNJANG FUNGSI KOORDINASI,  
FASILITASI, KONSULTASI DAN KERJASAMA

No.	KEGIATAN	PERKIN TA. 2017	REALISASI					Jml realisasi
			Bid Fisik	Bid. Ekonomi	Bidang Sosbud	Bid. Litbang	Bid. PE	
1.	Program penunjang fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Perencanaan Pemb. Ekonomi c. Program Perencanaan Pembangunan Sosibud d. Program Perencanaan Tata Ruang e. Program Pemanfaatan Ruang f. Program Kerjasama Pembangunan	10 rumusan kebijakan	3	2	6	2	-	13
2	Jml.fasilitasi perenc. yang dilaksanakan	1	1	-	-	-	-	1
3	Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	1	-	-	-	-	1	1

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT

Sasaran strategis 1 : Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT

Indikator : a. Jumlah system perencanaan berbasis IT  
b. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan.

Dari indikator tersebut dapat dilihat realisasi atau capaian atas Jumlah system perencanaan berbasis IT, sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari :
- 1) Terbangunnya sistem / web data infrastruktur prasarana utama
  - 2) Update Informasi sistem database pembangunan daerah /profil daerah
  - 3) Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Dari indikatortr Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, terdiri dari :

- 1) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan 1
- 2) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan II / Semester 1
- 3) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan III
- 4) Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD triwulan IV / Semester II
- 5) Dokumen Laporan Keuangan

Sasaran strategis 2 : Tercapainya keselarasan perencanaan

- Indikator : a. Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja
- b. Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program

Dari indikator jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja yang terealisasi adalah program yang selaras 100 %, lihat tabel berikut:

TABEL 9  
KESELARASAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN RENJA TAHUN 2017

KESELARASAN	RKPD		RENJA	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
Selaras	15	53	15	53
Tidak Selaras	-	-	-	-
Jumlah	15	53	15	53

Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu :

1. Dokumen KUA tahun 2018, yang merupakan dokumen Kebijakan Umum Anggaran tahun 2018
2. Dokumen PPAS tahun 2018, adalah dokumen perencanaan terkait dengan penetapan Pagu Plafon Anggaran Sementara tahun 2018
3. Dokumen KUA Perubahan tahun 2017, yang merupakan dokumen Kebijakan Umum Anggaran tahun 2017
4. Dokumen PPAS Perubahan tahun 2017, adalah dokumen perencanaan terkait dengan penetapan Pagu Plafon Anggaran Sementara tahun 2017.

Dokumen perencanaan penganggaran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sementara untuk SKPD.

Tujuan 4 : Meningkatnya kompetensi aparatur perencana

Sasaran strategis 1 : Tersedianya SDM perencana yang kompeten

- Indikator : a Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi

Indikator Jumlah dokumen aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi, dilakukan terhadap sub bagian program untuk seluruh SKPD dan kecamatan.

**TABEL 10**  
**PESERTA BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN**

No	PELAKSANAAN	PERENCANA/ SUBBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN (org)
1	HARI 1	71
2	HARI 2	80
	JUMLAH	151

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Sistem penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

**TABEL 11**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2017	APBD SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2017
1	PENDAPATAN	-	-
2	BELANJA DAERAH	12.575.769.200,00	14.803.971.100,00

Adanya penyesuaian program dan kegiatan, adanya penambahan aset menyebabkan perubahan posisi neraca dan laporan realisasi anggaran.

#### **C.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon berupa alokasi pendapatan dan belanja. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengelola dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja dengan realiasi capaian sebagai berikut :

TABEL 12  
ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Daerah	14.803.971.100,00	13.503.021.748,00	1.300.949.352,00	91,21
Belanja Tidak Langsung	4.496.004.000,00	4.362.332.750,00	133.671.250,00	97,03
Belanja Langsung	10.307.967.100,00	9.140.688.998,00	1.167.278.102,00	88,68

## C.2 Raaalisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

TABEL 13  
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 dan 2016

Nom or Urut	Uraian	Jumlah	Realisasi	%	Realisasi
		Anggaran	2017		2016
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.803.971.100,00</b>	<b>13.503.021.748,00</b>	<b>91,21</b>	<b>17.297.500.531,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.496.004.000,00</b>	<b>4.362.332.750,00</b>	<b>97,03</b>	<b>3.619.493.668,00</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	4.496.004.000,00	4.362.332.750,00	97,03	3.619.493.668,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.307.967.100,00</b>	<b>9.140.688.998,00</b>	<b>88,68</b>	<b>13.678.006.863,00</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	1.794.190.000,00	1.464.341.000,00	81,62	1.009.962.000,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.376.461.800,00	6.559.726.298,00	88,93	7.658.433.863,00
2.2.3.	Belanja Modal	1.137.315.300,00	1.116.621.700,00	98,18	5.009.611.000,00

Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU	Realisasi Anggaran		SISA DPPA 2017	
			ANGGARAN 2017 (Rp)	2017			
1	2	3	4	5		6	
				Rp	%	Rp	%
		<b>URUSAN PENATAAN RUANG</b>	<b>316,425,000</b>	<b>270,896,300</b>	<b>85.6%</b>	<b>45,528,700</b>	<b>14.39%</b>
<b>I</b>	<b>1.03.4.01.06.35</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>237,515,000</b>	<b>192,152,900</b>	<b>80.9%</b>	<b>45,362,100</b>	<b>19.10%</b>
1	1.03.4.01.06.35.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	157,585,000	112,611,500	71.5%	44,973,500	28.54%
2	1.03.4.01.06.35.10	Rapat Koord. tentang Rencana Tata Ruang	79,930,000	79,541,400	99.5%	388,600	0.49%
<b>II</b>	<b>1.03.4.01.06.36.</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>78,910,000</b>	<b>78,743,400</b>	<b>99.8%</b>	<b>166,600</b>	<b>0.21%</b>
3	1.03.4.01.06.36.04.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	78,910,000	78,743,400	99.8%	166,600	0.21%
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3,026,855,000</b>	<b>2,760,988,791</b>	<b>91.2%</b>	<b>265,866,209</b>	<b>8.78%</b>
<b>III</b>	<b>4.01.06.4.01.06.01</b>	<b>Program Pelayanan Adm.Perkantoran</b>	<b>1,872,703,000</b>	<b>1,624,277,791</b>	<b>86.7%</b>	<b>248,425,209</b>	<b>13.27%</b>
4	4.01.06.4.01.06.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262,200,000	117,893,104	45.0%	144,306,896	55.04%
5	4.01.06.4.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	11,000,000	8,117,400	73.8%	2,882,600	26.21%
6	4.01.06.4.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	29,880,000	99.6%	120,000	0.40%
7	4.01.06.4.01.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	54,250,000	54,250,000	100%	0	0.00%
8	4.01.06.4.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66,500,000	66,393,000	99.8%	107,000	0.16%
9	4.01.06.4.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,200,000	23,200,000	100.0%	0	0.00%
10	4.01.06.4.01.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14,000,000	14,000,000	1000%	0	0.00%
11	4.01.06.4.01.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,051,255,000	1,022,191,400	97.2%	29,063,600	2.76%
12	4.01.06.4.01.06.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,600,000	63,600,000	100 %	0	0.00%
13	4.01.06.4.01.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44,898,000	41,155,500	91.7%	3,742,500	8.34%
14	4.01.06.4.01.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	54,000,000	49,000,000	90.7%	5,000,000	9.26%
15	4.01.06.4.01.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	197,800,000	134,597,387	68.0%	63,202,613	31.95%
<b>IV</b>	<b>4.01.06.4.01.06.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>764,652,000</b>	<b>754,766,000</b>	<b>98.7%</b>	<b>9,886,000</b>	<b>1.29%</b>
16	4.01.06.4.01.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	606,000,000	597,500,000	98.6%	8,500,000	1.40%
17	4.01.06.4.01.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113,652,000	112,266,000	98.8%	1,386,000	1.22%
18	4.01.06.4.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	100.0%	0	0.00%
19	4.01.06.4.01.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	20,000,000	20,000,000	100 %	0	0.00%
<b>V</b>	<b>4.01.06.4.01.06.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>80,000,000</b>	<b>78,625,000</b>	<b>98.3%</b>	<b>1,375,000</b>	<b>1.72%</b>
20	4.01.06.4.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	60,000,000	58,625,000	97.7%	1,375,000	2.29%
21	4.01.06.4.01.06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0.00%
<b>VI</b>	<b>4.01.06.4.01.06.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>235,000,000</b>	<b>231,400,000</b>	<b>98.5%</b>	<b>3,600,000</b>	<b>1.53%</b>
22	4.01.06.4.01.06.05.12	Bimbingan Teknis Peny. Dokumen Perenc.	235,000,000	231,400,000	98.5%	3,600,000	1.53%
<b>VII</b>	<b>4.01.06.4.01.06.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>58,000,000</b>	<b>55,420,000</b>	<b>95.6%</b>	<b>2,580,000</b>	<b>4.45%</b>
23	4.01.06.4.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,000,000	43,100,000	98.0%	900,000	2.05%
24	4.01.06.4.01.06.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,000,000	6,160,000	88.0%	840,000	12.00%
25	4.01.06.4.01.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,000,000	6,160,000	88.0%	840,000	12.00%



VIII	4.01.06.4.01.06.07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100%	0	0.00%
26	4.01.06.4.01.06.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100%	0	0.00%
		<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>6,764,687,100</b>	<b>5,949,548,385</b>	<b>88.0%</b>	<b>815,138,715</b>	<b>12.05%</b>
IX	4.01.4.01.06.15.	Program Pengembangan data/Informasi	1,384,279,400	1,325,724,100	95.8%	58,555,300	4.23%
27	4.01.4.01.06.15.02.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dok. Perencanaan	983,950,000	969,737,900	98.6%	14,212,100	1.44%
28	4.01.4.01.06.15.12.	Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kab. Cirebon	200,000,000	195,080,000	97.5%	4,920,000	2.46%
29	4.01.4.01.06.15.22.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	200,329,400	160,906,200	80.3%	39,423,200	19.68%
X	4.01.4.01.06.16.	Program Kerjasama Pembangunan	52,228,000	32,578,000	62.4%	19,650,000	37.62%
30	4.01.4.01.06.16.08.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	52,228,000	32,578,000	62.4%	19,650,000	37.62%
XI	4.01.4.01.06.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	350,000,000	340,088,900	97.2%	9,911,100	2.83%
31	4.01.4.01.06.19.09.	Koordinasi Perenc.n Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	350,000,000	340,088,900	97.2%	9,911,100	2.83%
XII	4.01.4.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,507,969,700	2,075,563,870	82.8%	432,405,830	17.24%
32	4.01.4.01.06.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	731,571,000	689,447,600	94.2%	42,123,400	5.76%
33	4.01.4.01.06.21.10	Penetapan RKPD	335,508,300	282,685,600	84.3%	52,822,700	15.74%
34	4.01.4.01.06.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	189,313,500	181,813,500	96.0%	7,500,000	3.96%
35	4.01.4.01.06.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	260,046,900	198,101,500	76.2%	61,945,400	23.82%
36	4.01.4.01.06.21.14	Perjanjian Kinerja	149,442,500	149,142,500	99.8%	300,000	0.20%
37	4.01.4.01.06.21.20	Penyusunan Lap. Ikhtisar Kinerja SKPD	167,880,000	167,594,670	99.8%	285,330	0.17%
38	4.01.4.01.06.21.21	Evaluasi RPJMD	245,600,000	33,429,800	13.6%	212,170,200	86.39%
39	4.01.4.01.06.21.32	Penetapan RKPD Perubahan	76,490,000	72,165,000	94.3%	4,325,000	5.65%
40	4.01.4.01.06.21.33	Penyusunan KUA PPAS	159,047,500	112,023,700	70.4%	47,023,800	29.57%
41	4.01.4.01.06.21.34	Peny. KUA PPAS Perubahan	68,070,000	64,350,000	94.5%	3,720,000	5.46%
42	4.01.4.01.06.21.62	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	125,000,000	124,810,000	99.8%	190,000	0.15%
XIII	4.01.4.01.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	762,950,000	705,503,215	92.5%	57,446,785	7.53%
43	4.01.4.01.06.22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	400,000,000	375,219,950	93.8%	24,780,050	6.20%
44	4.01.4.01.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masy.	249,000,000	220,142,000	88.4%	28,858,000	11.59%
45	4.01.4.01.06.22.04.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	113,950,000	110,141,265	96.7%	3,808,735	3.34%
XIV	4.01.4.01.06.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1,707,260,000	1,470,090,300	86.1%	237,169,700	13.89%
46	4.01.4.01.06.23.03	Koordinasi Perenc.Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	202,500,000	178,323,000	88.1%	24,177,000	11.94%
47	4.01.4.01.06.23.54	Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	258,410,000	249,736,000	96.6%	8,674,000	3.36%
48	4.01.4.01.06.23.55	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	200,000,000	185,896,000	92.9%	14,104,000	7.05%
49	4.01.4.01.06.23.57	Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	196,350,000	184,945,000	94.2%	11,405,000	5.81%
50	4.01.4.01.06.23.61.	Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG	750,000,000	583,100,300	77.7%	166,899,700	22.25%
51	4.01.4.01.06.23.62	Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon	100,000,000	88,090,000	88.1%	11,910,000	11.91%
		<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>200,000,000</b>	<b>159,255,522</b>	<b>79.6%</b>	<b>40,744,478</b>	<b>20.37%</b>
XV	4.04.4.01.06.15	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	200,000,000	159,255,522	79.6%	40,744,478	20.37%
52	4.04.4.01.06.15.05	Seminar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	100,000,000	85,085,522	85.1%	14,914,478	14.91%
53	4.04.4.01.06.15.06	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100,000,000	74,170,000	74.2%	25,830,000	25.83%
		<b>Jumlah</b>	<b>10,307,967,100</b>	<b>9,140,688,998</b>	<b>88.7%</b>	<b>1,167,278,102</b>	<b>11.32%</b>

elanja tidak langsung merupakan alokasi belanja yang digunakan untuk belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung merupakan alokasi belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian/Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tabel 15  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017	
		(Rp)	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4		5	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3,026,855,000</b>	<b>2,760,988,791</b>	<b>91.2%</b>	<b>265,866,209</b>	<b>8.78%</b>
<b>4.01.06.4.01.06.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,872,703,000</b>	<b>1,624,277,791</b>	<b>86.7%</b>	<b>248,425,209</b>	<b>13.27%</b>
4.01.06.4.01.06.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262,200,000	117,893,104	45.0%	144,306,896	55.04%
4.01.06.4.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	11,000,000	8,117,400	73.8%	2,882,600	26.21%
4.01.06.4.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	29,880,000	99.6%	120,000	0.40%
4.01.06.4.01.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	54,250,000	54,250,000	100.0%	0	0.00%
4.01.06.4.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66,500,000	66,393,000	99.8%	107,000	0.16%
4.01.06.4.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,200,000	23,200,000	100.0%	0	0.00%
4.01.06.4.01.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	14,000,000	14,000,000	100.0%	0	0.00%
4.01.06.4.01.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,051,255,000	1,022,191,400	97.2%	29,063,600	2.76%
4.01.06.4.01.06.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,600,000	63,600,000	100.0%	0	0.00%
4.01.06.4.01.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	44,898,000	41,155,500	91.7%	3,742,500	8.34%
4.01.06.4.01.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	54,000,000	49,000,000	90.7%	5,000,000	9.26%
4.01.06.4.01.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	197,800,000	134,597,387	68.0%	63,202,613	31.95%
<b>4.01.06.4.01.06.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>764,652,000</b>	<b>754,766,000</b>	<b>98.7%</b>	<b>9,886,000</b>	<b>1.29%</b>
4.01.06.4.01.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	606,000,000	597,500,000	98.6%	8,500,000	1.40%
4.01.06.4.01.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113,652,000	112,266,000	98.8%	1,386,000	1.22%
4.01.06.4.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	100.0%	0	0.00%
4.01.06.4.01.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0.00%
<b>4.01.06.4.01.06.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>80,000,000</b>	<b>78,625,000</b>	<b>98.3%</b>	<b>1,375,000</b>	<b>1.72%</b>
4.01.06.4.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	60,000,000	58,625,000	97.7%	1,375,000	2.29%
4.01.06.4.01.06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0.00%

4.01.06.4.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235,000,000	231,400,000	98.5%	3,600,000	1.53%
4.01.06.4.01.06.05.12	Bimbingan Teknis Peny. Dokumen Perencanaan	235,000,000	231,400,000	98.5%	3,600,000	1.53%
4.01.06.4.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,000,000	55,420,000	95.6%	2,580,000	4.45%
4.01.06.4.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,000,000	43,100,000	98.0%	900,000	2.05%
4.01.06.4.01.06.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,000,000	6,160,000	88.0%	840,000	12.00%
4.01.06.4.01.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,000,000	6,160,000	88.0%	840,000	12.00%
4.01.06.4.01.06.07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100.0%	0	0.00%
4.01.06.4.01.06.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100.0%	0	0.00%
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>200,000,000</b>	<b>195,080,000</b>	<b>97.5%</b>	<b>4,920,000</b>	<b>2.46%</b>
4.01.4.01.06.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	200,000,000	195,080,000	97.5%	4,920,000	2.46%
4.01.4.01.06.15.12.	Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon	200,000,000	195,080,000	97.5%	4,920,000	2.46%
JUMLAH		3,226,855,000	2,956,068,791	91.6%	270,786,209	8.39%

## b. Bidang Ekonomi

Tabel 16  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017	
		(Rp)	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4		5	
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>762,950,000</b>	<b>705,503,215</b>	<b>92.5%</b>	<b>57,446,785</b>	<b>7.53%</b>
4.01.4.01.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	762,950,000	705,503,215	92.5%	57,446,785	7.53%
4.01.4.01.06.22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	400,000,000	375,219,950	93.8%	24,780,050	6.20%
4.01.4.01.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masya.	249,000,000	220,142,000	88.4%	28,858,000	11.59%
4.01.4.01.06.22.04.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	113,950,000	110,141,265	96.7%	3,808,735	3.34%

c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 17  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017	
		(Rp)				
1	2	3	4		5	
			Rp	%	Rp	%
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1,707,260,000</b>	<b>1,470,090,300</b>	<b>86.1%</b>	<b>237,169,700</b>	<b>13.89%</b>
<b>4.01.4.01.06.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>1,707,260,000</b>	<b>1,470,090,300</b>	<b>86.1%</b>	<b>237,169,700</b>	<b>13.89%</b>
4.01.4.01.06.23.03	Koordinasi Perenc. Pemb. Bidang Sosial dan Budaya	202,500,000	178,323,000	88.1%	24,177,000	11.94%
4.01.4.01.06.23.54	Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	258,410,000	249,736,000	96.6%	8,674,000	3.36%
4.01.4.01.06.23.55	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	200,000,000	185,896,000	92.9%	14,104,000	7.05%
4.01.4.01.06.23.57	Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	196,350,000	184,945,000	94.2%	11,405,000	5.81%
4.01.4.01.06.23.61.	Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG	750,000,000	583,100,300	77.7%	166,899,700	22.25%
4.01.4.01.06.23.62	Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon	100,000,000	88,090,000	88.1%	11,910,000	11.91%

d. Bidang Fisik dan Prasarana

Tabel 18  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017	
		(Rp)				
1	2	3	4		5	
			Rp	%	Rp	%
	<b>URUSAN PENATAAN RUANG</b>	<b>316,425,000</b>	<b>270,896,300</b>	<b>85.6%</b>	<b>45,528,700</b>	<b>14.39%</b>
<b>1.03.4.01.06.35</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>237,515,000</b>	<b>192,152,900</b>	<b>80.9%</b>	<b>45,362,100</b>	<b>19.10%</b>
1.03.4.01.06.35.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	157,585,000	112,611,500	71.5%	44,973,500	28.54%
1.03.4.01.06.35.10	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	79,930,000	79,541,400	99.5%	388,600	0.49%
<b>1.03.4.01.06.36.</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>78,910,000</b>	<b>78,743,400</b>	<b>99.8%</b>	<b>166,600</b>	<b>0.21%</b>
1.03.4.01.06.36.04.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	78,910,000	78,743,400	99.8%	166,600	0.21%
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1,333,950,000</b>	<b>1,309,826,800</b>	<b>98.2%</b>	<b>24,123,200</b>	<b>1.81%</b>
<b>4.01.4.01.06.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>983,950,000</b>	<b>969,737,900</b>	<b>98.6%</b>	<b>14,212,100</b>	<b>1.44%</b>
4.01.4.01.06.15.02.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dok. Perencanaan	983,950,000	969,737,900	98.6%	14,212,100	1.44%
<b>4.01.4.01.06.19.</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>	<b>350,000,000</b>	<b>340,088,900</b>	<b>97.2%</b>	<b>9,911,100</b>	<b>2.83%</b>
4.01.4.01.06.19.09.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	350,000,000	340,088,900	97.2%	9,911,100	2.83%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,650,375,000</b>	<b>1,580,723,100</b>	<b>95.8%</b>	<b>69,651,900</b>	<b>4.22%</b>

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Tabel 19  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017	
		(Rp)				
1	2	3	4		5	
			Rp	%	Rp	%
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2,222,047,100</b>	<b>1,943,213,600</b>	<b>87.5%</b>	<b>278,833,500</b>	<b>12.55%</b>
<b>4.01.4.01.06.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>200,329,400</b>	<b>160,906,200</b>	<b>80.3%</b>	<b>39,423,200</b>	<b>19.68%</b>
4.01.4.01.06.15.22.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	200,329,400	160,906,200	80.3%	39,423,200	19.68%
<b>4.01.4.01.06.16.</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>52,228,000</b>	<b>32,578,000</b>	<b>62.4%</b>	<b>19,650,000</b>	<b>37.62%</b>
4.01.4.01.06.16.08.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	52,228,000	32,578,000	62.4%	19,650,000	37.62%
<b>4.01.4.01.06.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1,969,489,700</b>	<b>1,749,729,400</b>	<b>88.8%</b>	<b>219,760,300</b>	<b>11.16%</b>
4.01.4.01.06.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	731,571,000	689,447,600	94.2%	42,123,400	5.76%
4.01.4.01.06.21.10	Penetapan RKPD	335,508,300	282,685,600	84.3%	52,822,700	15.74%
4.01.4.01.06.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	189,313,500	181,813,500	96.0%	7,500,000	3.96%
4.01.4.01.06.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pemb.Daerah	260,046,900	198,101,500	76.2%	61,945,400	23.82%
4.01.4.01.06.21.14	Perjanjian Kinerja	149,442,500	149,142,500	99.8%	300,000	0.20%
4.01.4.01.06.21.32	Penetapan RKPD Perubahan	76,490,000	72,165,000	94.3%	4,325,000	5.65%
4.01.4.01.06.21.33	Penyusunan KUA PPAS	159,047,500	112,023,700	70.4%	47,023,800	29.57%
4.01.4.01.06.21.34	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	68,070,000	64,350,000	94.5%	3,720,000	5.46%

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tabel 20  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017	
		(Rp)	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4		5	
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>787,480,000</b>	<b>545,976,470</b>	<b>69.3%</b>	<b>241,503,530</b>	<b>30.67%</b>
<b>4.01.4.01.06.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>538,480,000</b>	<b>325,834,470</b>	<b>60.5%</b>	<b>212,645,530</b>	<b>39.49%</b>
4.01.4.01.06.21.20	Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	167,880,000	167,594,670	99.8%	285,330	0.17%
4.01.4.01.06.21.21	Evaluasi RPJMD	245,600,000	33,429,800	13.6%	212,170,200	86.39%
4.01.4.01.06.21.62	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	125,000,000	124,810,000	99.8%	190,000	0.15%
<b>4.01.4.01.06.22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>249,000,000</b>	<b>220,142,000</b>	<b>88.4%</b>	<b>28,858,000</b>	<b>11.59%</b>
4.01.4.01.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengemb. ekonomi masy.	249,000,000	220,142,000	88.4%	28,858,000	11.59%
	<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>200,000,000</b>	<b>159,255,522</b>	<b>79.6%</b>	<b>40,744,478</b>	<b>20.37%</b>
<b>4.04.4.01.06.15</b>	<b>Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah</b>	<b>200,000,000</b>	<b>159,255,522</b>	<b>79.6%</b>	<b>40,744,478</b>	<b>20.37%</b>
4.04.4.01.06.15.05	Seminar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	100,000,000	85,085,522	85.1%	14,914,478	14.91%
4.04.4.01.06.15.06	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100,000,000	74,170,000	74.2%	25,830,000	25.83%
	<b>JUMLAH</b>	<b>987,480,000</b>	<b>705,231,992</b>	<b>71.4%</b>	<b>282,248,008</b>	<b>28.58%</b>

## D. Permasalahan dan Solusi

### D.1 Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi Bappelitbangda pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan, terutama yang berbasis IT
2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan.
3. Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses perencanaan.
6. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.
7. Masih ada SKPD yang belum memahami tentang indikator makro ekonomi maupun indikator secara menyeluruh.
8. Kegiatan yang anggarannya ada di APBD Perubahan, banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena waktunya yang sangat terbatas.
9. Ketidaksepehaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

## **D.2 Solusi**

1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional.
2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai Bappelitbangda untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
4. Melakukan kegiatan penguatan delegasi musrenbang.
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.
6. Merevisi dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran.
8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan harus lebih ditingkatkan.
9. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD
10. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang diinformasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

## E. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos Realisasi Anggaran

Tidak terealisasinya Belanja Langsung pada periode ini antara lain terdapat pada beberapa kegiatan, sebagai berikut :

### a. Sekretariat

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4		5		6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3,026,855,000</b>	<b>2,760,988,791</b>	<b>91.2%</b>	<b>265,866,209</b>	<b>8.78%</b>	
<b>4.01.06.4.01.06.01</b>	<b>Program Pelayanan Adm.Perkantoran</b>	<b>1,872,703,000</b>	<b>1,624,277,791</b>	<b>86.7%</b>	<b>248,425,209</b>	<b>13.27%</b>	
4.01.06.4.01.06.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262,200,000	117,893,104	45.0%	144,306,896	55.04%	Total yang tidak diserap Rp 144.306.896,- terdiri dari : Belanja Telepon (Rp. 38,986,460,-) Belanja Air (Rp. 148.400,-) Belanja Listrik (Rp. 105,172,036,-)
4.01.06.4.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	11,000,000	8,117,400	73.8%	2,882,600	26.21%	Total yang tidak diserap Rp 2.882.600,- terdiri dari : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (Rp. 2,882,600,-)
4.01.06.4.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	29,880,000	99.6%	120,000	0.40%	Total yang tidak diserap Rp 120.000,- terdiri dari : Belanja Jasa Upah Tukang/Mandor Juru Laden/Petugas Kebersihan (Rp. 120.000,-)
4.01.06.4.01.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	54,250,000	54,250,000	100 %	0	0.00%	
4.01.06.4.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66,500,000	66,393,000	99.8%	107,000	0.16%	Total yang tidak diserap Rp. 107.000,- terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor (Rp. 107.000,-)
4.01.06.4.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,200,000	23,200,000	100 %	0	0.00%	
4.01.06.4.01.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	14,000,000	14,000,000	100 %	0	0.00%	
4.01.06.4.01.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,051,255,000	1,022,191,400	97.2%	29,063,600	2.76%	Total yang tidak diserap Rp. 29,063,600,- terdiri dari : Belanja Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp. 8.100.000,-) Penjilidan (Rp. 270.000,-) Belanja Modal papan Visual elektronik (Rp. 250.000,-) AC (Rp. 1.600.000,-) Teralis Besi (Rp. 402.000,-) Printer (Rp. 400.000,-) Monitor/Display (Rp. 1.800.000,-) Meja Kerja (Rp. 1.200,-) Meja Rapat (Rp. 300.000,-) Meja Resepsionis (Rp. 1.034.700,-) Kursi Kerja (Rp. 50.000,-) Kursi Rapat (Rp.2.000,-) Kursi Tunggu (Rp. 28.700,-) Kursi Lipat (Rp. 17.500.000,-) Tabung Gas (Rp. 100.000) Kompor gas (Rp. 100.000,-) Kamera (Rp. 200.000,-) Proyektor (Rp.1.200.000,-) Sound Sistem (Rp. 200.000) Wireless (Rp. 225.000,-) Belanja CCTV (Rp. 300.000,-) ada sisa pagu anggaran sebesar (Rp. 4.900.000,-) pada Belanja Modal Pengadaan Scanner
4.01.06.4.01.06.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,600,000	63,600,000	100 %	0	0.00%	
4.01.06.4.01.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	44,898,000	41,155,500	91.7%	3,742,500	8.34%	Total yang tidak diserap Rp. 3,742,500,- terdiri dari : Belanja Surat Kabar/majalah (Rp. 3,742,500,-)
4.01.06.4.01.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	54,000,000	49,000,000	90.7%	5,000,000	9.26%	Total yang tidak diserap Rp. 5,000,000,- terdiri dari : Belanja makanan dan Minuman Tamu (Rp. 5,000,000,-)
4.01.06.4.01.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	197,800,000	134,597,387	68.0%	63,202,613	31.95%	Total yang tidak diserap Rp. 63,202,613,- terdiri dari : Belanja Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 63,202,613,-)
<b>4.01.06.4.01.06.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>764,652,000</b>	<b>754,766,000</b>	<b>98.7%</b>	<b>9,886,000</b>	<b>1.29%</b>	
4.01.06.4.01.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	606,000,000	597,500,000	98.6%	8,500,000	1.40%	Total yang tidak diserap Rp. 8.500.000,- terdiri dari : Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap (Rp. 4,200,000,-) Belanja Pengisian Tabung Gas (Rp. 3,050,000) Belanja Penjilidan (Rp. 90,000) Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor (Rp. 1.160,000)



4.01.06.4.01.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113,652,000	112,266,000	98.8%	1,386,000	1.22%	Total yang tidak diserap Rp. 1.386.000,- terdiri dari : Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas (Rp. 1.386.000,-)
4.01.06.4.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	100 %	0	0.00%	
4.01.06.4.01.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	20,000,000	20,000,000	100 %	0	0.00%	
<b>4.01.06.4.01.06.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>80,000,000</b>	<b>78,625,000</b>	<b>98.3%</b>	<b>1,375,000</b>	<b>1.72%</b>	
4.01.06.4.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	60,000,000	58,625,000	97.7%	1,375,000	<b>2.29%</b>	Total yang tidak diserap Rp. 1.375.000,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa (Rp. 900.000,-) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (Rp. 475.000,-)
4.01.06.4.01.06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20,000,000	20,000,000	100 %	0	<b>0.00%</b>	
<b>4.01.06.4.01.06.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>235,000,000</b>	<b>231,400,000</b>	<b>98.5%</b>	<b>3,600,000</b>	<b>1.53%</b>	
4.01.06.4.01.06.05.12	Bimbingan Teknis Peny. Dokumen Perenc.	235,000,000	231,400,000	98.5%	3,600,000	1.53%	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 900.000,- ; efisiensi jasa travel Rp 500.000,- ; honorarium narasumber tidak hadir Rp 2.200.000,-
<b>4.01.06.4.01.06.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>58,000,000</b>	<b>55,420,000</b>	<b>95.6%</b>	<b>2,580,000</b>	<b>4.45%</b>	
4.01.06.4.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,000,000	43,100,000	98.0%	900,000	2.05%	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 900,000,-
4.01.06.4.01.06.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,000,000	6,160,000	88.0%	840,000	12.00%	uang lembur PNS Rp 420.000,- mamin lembur Rp 420.000,-
4.01.06.4.01.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,000,000	6,160,000	88.0%	840,000	12.00%	uang lembur PNS Rp 420.000,- mamin lembur Rp 420.000,-
<b>4.01.06.4.01.06.07</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,500,000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
4.01.06.4.01.06.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100 %	0	0.00%	
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>200,000,000</b>	<b>195,080,000</b>	<b>97.5%</b>	<b>4,920,000</b>	<b>2.46%</b>	
<b>4.01.4.01.06.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>200,000,000</b>	<b>195,080,000</b>	<b>97.5%</b>	<b>4,920,000</b>	<b>2.46%</b>	
4.01.4.01.06.15.12.	Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon	200,000,000	195,080,000	97.5%	4,920,000	2.46%	Total yang tidak diserap Rp 4.920.000,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 900.000);Honorarium/ Uang Saku Peserta Keg. (Rp 3.075.000); Honorarium/Uang Saku/ Pengganti Transport Peserta Kegiatan (Rp 600.000); efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen (Rp 345.000).

## b. Bidang Ekonomi

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4		5		6
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>762,950,000</b>	<b>705,503,215</b>	<b>92.5%</b>	<b>57,446,785</b>	<b>7.53%</b>	
4.01.4.01.06.22	Program Perenc. Pembangunan Ekonomi	762,950,000	705,503,215	92.5%	57,446,785	7.53%	
4.01.4.01.06.22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	400,000,000	375,219,950	93.8%	24,780,050	6.20%	Total yang tidak diserap Rp 24.780.050,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 900.000); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 16.662.050,-); efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masterplan Pembangunan Ekonomi Sektor Informal (Rp 4.518.000,-); Belanja jasa narasumber PNS (Rp. 1.700.000,-); dan Belanja jasa narasumber non PNS (Rp. 1.000.000,-)
4.01.4.01.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	249,000,000	220,142,000	88.4%	28,858,000	11.59%	RTL: Solusi ekonomi hijau dengan sektor yang spesifik : Perusahaan berbasis keanekaragaman hayati yang dikelola oleh masyarakat daerah; Bisnis berbasis keanekaragaman hayati di masa depan; Ekowisata lintas batas; Sektor-sektor hijau yang inovatif; Menghijaukan sektor-sektor berdampak tinggi. Solusi ekonomi hijau lintas sektor: Perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang bersifat partisipatif; Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; Memperluas jaringan kawasan lindung dan meningkatkan konektivitas
4.01.4.01.06.22.04.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	113,950,000	110,141,265	96.7%	3,808,735	3.34%	Total yang tidak diserap Rp 3.808.735,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 308.735,-); dan Belanja jasa narasumber PNS (Rp. 3.500.000,-)
JUMLAH		762,950,000	705,503,215	92.5%	57,446,785	7.53%	

### c. Bidang Sosial Budaya

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4		5		6
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1,707,260,000</b>	<b>1,470,090,300</b>	<b>86.1%</b>	<b>237,169,700</b>	<b>13.89%</b>	
<b>4.01.4.01.06.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>1,707,260,000</b>	<b>1,470,090,300</b>	<b>86.1%</b>	<b>237,169,700</b>	<b>13.89%</b>	
4.01.4.01.06.23.03	Koordinasi Perenc. Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	202,500,000	178,323,000	88.1%	24,177,000	11.94%	Efisiensi penjiilidan Perbup tentang Pedoman Desa Sejahtera, uang saku sosialisasi Perbup, SPPD Luar Daerah karena terbentur dengan keterbatasan pagu pencairan tiap triwulan
4.01.4.01.06.23.54	Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	258,410,000	249,736,000	96.6%	8,674,000	3.36%	1. Efisiensi honorarium panitia pengadaan barjas, karena nilai kontraknya dibawah 50jt; 2. Efisiensi belanja ATK, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan belanja jasa narasumber PNS; 3. Sisa penawaran belanja jasa konsultasi
4.01.4.01.06.23.55	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	200,000,000	185,896,000	92.9%	14,104,000	7.05%	Adanya efisiensi anggaran dari hasil seleksi sederhana di ULP untuk pekerjaan kajian Penyusunan RAD Penanggulangan kemiskinan
4.01.4.01.06.23.57	Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	196,350,000	184,945,000	94.2%	11,405,000	5.81%	Adanya efisiensi anggaran dari hasil seleksi sederhana di ULP untuk pekerjaan kajian Penyusunan RAD Sustainable Development Goals
4.01.4.01.06.23.61.	Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG	750,000,000	583,100,300	77.7%	166,899,700	22.25%	1. Pengadaan Barjas dibawah Rp. 50jt sehingga honorarium Tim Pengadaan Barjas tidak di serap; 2. Honorarium non PNS untuk petugas updating data 80% (progress kerja), idealnya waktu yang dibutuhkan untuk updating data KM 0 Pro Poor di desil 1 sebanyak 72.385 KRTS adalah 3-4 bulan, karena dana transfer dari propinsi terlambat sehingga waktu pelaksanaan hanya 1,5 bln disamping faktor cuaca, akses jalan yang sulit, trouble teknis pada aplikasi, dan waktu pelaksanaan updating data di akhir tahun berbenturan dengan tugas pokok petugas updating data KM 0 Pro Poor 4. Efisiensi belanja sewa kamar hotel, 5. Efisiensi perjalanan dinas luar daerah. 6. Efisiensi honor narasumber
4.01.4.01.06.23.62	Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon	100,000,000	88,090,000	88.1%	11,910,000	11.91%	Efisiensi anggaran dari penjiilidan lap akhir/tahunan dan lap periodik CSR, perjananan dinas luar daerah, belanja narasumber PNS, FGD Tim Fasilitas TJSL
<b>JUMLAH</b>		<b>1,707,260,000</b>	<b>1,470,090,300</b>	<b>86.1%</b>	<b>237,169,700</b>	<b>13.89%</b>	

#### d. Bidang Fisik dan Prasarana

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4		5		6
	<b>URUSAN PENATAAN RUANG</b>	<b>316,425,000</b>	<b>270,896,300</b>	<b>85.6%</b>	<b>45,528,700</b>	<b>14.39%</b>	
1.03.4.01.06.35	Program Perencanaan Tata Ruang	237,515,000	192,152,900	80.9%	45,362,100	19.10%	
1.03.4.01.06.35.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	157,585,000	112,611,500	71.5%	44,973,500	28.54%	Total yang tidak diserap Rp 44.973.500,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 700.000); Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan (Rp 462.000); Honorarium/Uang Saku/ Pengganti Transport Peserta Kegiatan (Rp 5.973.000); Belanja Cetak (Rp. 30.000.000,-), Belanja makan minum rapat (Rp. 384.000), Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 654.500,-), dan Belanja jasa tenaga ahli Instruktur/Narasumber PNS (Rp. 6.800.00,-)
1.03.4.01.06.35.10	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	79,930,000	79,541,400	99.5%	388,600	0.49%	Total yang tidak diserap Rp 388.600,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 388.600,-)
1.03.4.01.06.36.	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>78,910,000</b>	<b>78,743,400</b>	<b>99.8%</b>	<b>166,600</b>	<b>0.21%</b>	
1.03.4.01.06.36.04.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	78,910,000	78,743,400	99.8%	166,600	0.21%	Total yang tidak diserap Rp 166.600,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 91.600,-) dan efisiensi Belanja jasa konsultasi perencanaan (Rp. 75.000,-)
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1,333,950,000</b>	<b>1,309,826,800</b>	<b>98.2%</b>	<b>24,123,200</b>	<b>1.81%</b>	
4.01.4.01.06.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	983,950,000	969,737,900	98.6%	14,212,100	1.44%	
4.01.4.01.06.15.02.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Peny. Dokumen Perencanaan	983,950,000	969,737,900	98.6%	14,212,100	1.44%	Total yang tidak diserap Rp 14.212.100,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 3.150.000); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 94.600,- ); dan efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pelabuhan Kabupaten Cirebon (Rp 10.967.500,-).
4.01.4.01.06.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	350,000,000	340,088,900	97.2%	9,911,100	2.83%	
4.01.4.01.06.19.09.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	350,000,000	340,088,900	97.2%	9,911,100	2.83%	Total yang tidak diserap Rp 9.911.100,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 728.600,-); dan efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen (Rp 9.182.500,-).
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,650,375,000</b>	<b>1,580,723,100</b>	<b>95.8%</b>	<b>69,651,900</b>	<b>4.22%</b>	

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4		5		6
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2,222,047,100</b>	<b>1,943,213,600</b>	<b>87.5%</b>	<b>278,833,500</b>	<b>12.55%</b>	
4.01.4.01.06.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	200,329,400	160,906,200	80.3%	39,423,200	19.68%	
4.01.4.01.06.15.22.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	200,329,400	160,906,200	80.3%	39,423,200	19.68%	Total yang tidak diserap Rp 39.423.200,- terdiri dari : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rp 38.850.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 273.200); dan efisiensi Belanja Jasa EO (Rp 300.000).
4.01.4.01.06.16.	Program Kerjasama Pembangunan	52,228,000	32,578,000	62.4%	19,650,000	37.62%	
4.01.4.01.06.16.08.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	52,228,000	32,578,000	62.4%	19,650,000	37.62%	Total yang tidak diserap Rp 19.650.000,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 500.000,-);Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (Rp 2.500.000,-); Belanja Mamin Rapat (Rp 4.000.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 2.100.000,-) ; Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS (Rp 10.000.000,-) dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Non PNS (Rp 550.000,-)
4.01.4.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,969,489,700	1,749,729,400	88.8%	219,760,300	11.16%	
4.01.4.01.06.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	731,571,000	689,447,600	94.2%	42,123,400	5.76%	Total yang tidak diserap Rp 42.123.400,- terdiri dari : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Rp 20.350.000,-); Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp1.000.000,-); Honorarium/Uang Saku (Rp 6.825.000,-); Belanja BBM/Gas (Rp 2.092.500,-); Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (Rp 350.000,-); Belanja Mamin Rapat (Rp 6.000.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 255.900,-) ; Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS (Rp 2.100.000,-) dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Non PNS (Rp 3.150.000,-)
4.01.4.01.06.21.10	Penetapan RKPD	335,508,300	282,685,600	84.3%	52,822,700	15.74%	Total yang tidak diserap Rp 52.822.700,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 2.700.000,-); Uang Lembur PNS (Rp 4.080.000); Uang Lembur PNS (Rp 420.000); Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rp 1.200.000,-); Belanja Mamin Rapat (Rp 9.600.000,-); Belanja Mamin Lembur (Rp 2.688.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 134.700,-) ; dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber PNS (Rp 32.000.000,-)
4.01.4.01.06.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	189,313,500	181,813,500	96.0%	7,500,000	3.96%	Total yang tidak diserap Rp 7.500.000,- , terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 1.500.000,-) dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 6.000.000,-)
4.01.4.01.06.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	260,046,900	198,101,500	76.2%	61,945,400	23.82%	Total yang tidak diserap Rp 61.945.400,-, terdiri dari : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rp 36.750.000,-); Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 600.000,-); Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Rp 18.000.000,-); Belanja Penggandaan (Rp 6.000.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 595.400,-)
4.01.4.01.06.21.14	Perjanjian Kinerja	149,442,500	149,142,500	99.8%	300,000	0.20%	Total yang tidak diserap Rp 300.000,-, terdiri dari : efisiensi Belanja Jasa EO (Rp 300.000).
4.01.4.01.06.21.32	Penetapan RKPD Perubahan	76,490,000	72,165,000	94.3%	4,325,000	5.65%	Total yang tidak diserap Rp 4.325.000,-, terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 500.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 3.825.000).
4.01.4.01.06.21.33	Penyusunan KUA PPAS	159,047,500	112,023,700	70.4%	47,023,800	29.57%	Total yang tidak diserap Rp 47.023.800,-, terdiri dari : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rp 1.200.000,-); Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 1.900.000,-); Uang Lembur PNS (Rp 3.672.000,-); Uang Lembur Non PNS (Rp 252.000,-); Belanja Sewa Ruang Rapat (Rp 38.400.000); Belanja Mamin Lembur (Rp 1.344.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 255.800,-)

4.01.4.01.06.21.34	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	68,070,000	64,350,000	94.5%	3,720,000	5.46%	Total yang tidak diserap Rp 3.720.000 terdiri dari: Belanja ATK (Rp 220.000,-); Belanja Sewa Ruang Rapat (Rp 2.000.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 1.500.000,-)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,222,047,100</b>	<b>1,943,213,600</b>	<b>87.5%</b>	<b>278,833,500</b>	<b>12.55%</b>	

#### f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017	Realisasi Anggaran 2017		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4		5		6
	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>787,480,000</b>	<b>545,976,470</b>	<b>69.3%</b>	<b>241,503,530</b>	<b>30.67%</b>	
4.01.4.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	538,480,000	325,834,470	60.5%	212,645,530	39.49%	
4.01.4.01.06.21.20	Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	167,880,000	167,594,670	99.8%	285,330	0.17%	sisa sppd dalam daerah
4.01.4.01.06.21.21	Evaluasi RPJMD	245,600,000	33,429,800	13.6%	212,170,200	86.39%	pekerjaan untuk penyusunan rencana perubahan RPJMD tidak bisa dilaksanakan karena terkait dengan keluarnya permendagri No. 86 tahun 2017 pasal 342 ayat 2 : Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila: a). sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b). sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
4.01.4.01.06.21.62	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	125,000,000	124,810,000	99.8%	190,000	0.15%	Total yang tidak diserap Rp. 190.000 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah (Rp. 25.000,-) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Rp. 165.000,-)
4.01.4.01.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	249,000,000	220,142,000	88.4%	28,858,000	11.59%	
4.01.4.01.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	249,000,000	220,142,000	88.4%	28,858,000	11.59%	RTL: Solusi ekonomi hijau dengan sektor yang spesifik : Perusahaan berbasis keaneka ragam hayati yang dikelola oleh masyarakat daerah; Bisnis berbasis keaneka ragam hayati di masa depan; Ekowisata lintas batas; Sektor-sektor hijau yang inovatif; Menghijaukan sektor-sektor berdampak tinggi. Solusi ekonomi hijau lintas sektor: Perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang bersifat partisipatif; Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; Memperluas jaringan kawasan lindung dan meningkatkan konektivitas
	<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>200,000,000</b>	<b>159,255,522</b>	<b>79.6%</b>	<b>40,744,478</b>	<b>20.37%</b>	
4.04.4.01.06.15	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	200,000,000	159,255,522	79.6%	40,744,478	20.37%	
4.04.4.01.06.15.05	Seminar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	100,000,000	85,085,522	85.1%	14,914,478	14.91%	Total yang tidak diserap Rp 14,914,478,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 14,050,000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 864,478.)
4.04.4.01.06.15.06	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100,000,000	74,170,000	74.2%	25,830,000	25.83%	Program prioritas yang perlu dilakukan: 1). Peny. dan penetapan regulasi; 2) peningkatan kualitas SDM; 3). Pembentukan dan pembinaan kelembagaan; 4). Pemberdayaan masyarakat; 5). Fasilitasi permodalan pemasaran; 6). Penyusunan pola insentif dan penjaminan usaha 7). penyediaan infrastruktur; 8). penguatan jejaring kerja
	<b>JUMLAH</b>	<b>987,480,000</b>	<b>705,231,992</b>	<b>71.4%</b>	<b>282,248,008</b>	<b>28.58%</b>	

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pelaksanaan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah ditetapkan pemerintah. LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh instansi Bappelitbangda, dengan tetap mengacu kepada kebijakan dan Program Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam upaya mencapai Visi Bappelitbangda yaitu “**BAPPELITBANGDA YANG ASPIRATIF, SINERGIS DAN AKUNTABEL BERBASIS IT TAHUN 2019**” pada gilirannya dalam mendukung terwujudnya Visi Pemerintahan Kabupaten Cirebon yaitu: “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera**”.

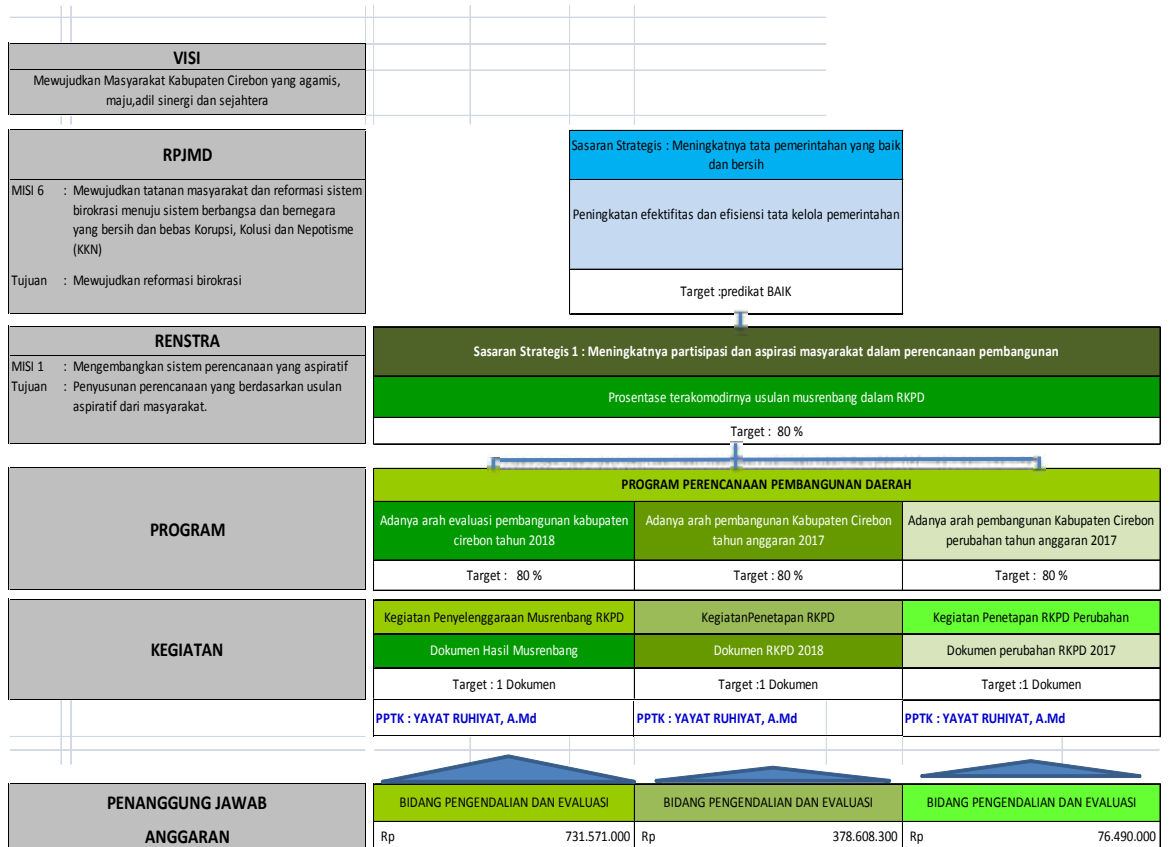
LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 disusun dengan tetap berdasarkan memperhatikan indikator, input, output, outcomes secara obyektif dan rasional dengan data yang aktual dan relevan sebagaimana yang dilaporkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Penyusunan LAKIP ini juga mengacu pada matriks Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LAKIP tahun 2017 ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu akan terus dilakukan perbaikan. Besar harapan kami LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan Kabupaten Cirebon khususnya urusan Perencanaan Pembangunan. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai bahan landasan guna perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dimasa yang akan datang.

# LAMPIRAN



## POHON KINERJA

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON





**POHON KINERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

<b>VISI</b>
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil sinergi dan sejahtera
<b>RPJMD</b>
MISI 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi

<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih</b>
Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
Target :predikat BAIK

<b>RENSTRA</b>
MISI 2 : Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama perencanaan pembangunan
Tujuan : Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koord, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

<b>Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.</b>		
1. Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	2. Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	3. Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan
Target : dokumen perencanaan 5 bidang	Target : 1 kegiatan	Target : 1 kegiatan

<b>PROGRAM</b>
Adanya review Capaian dan Target RPJMD Kabupaten Cirebon
Target : 1 Dokumen

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA-MENENGAH DAN BESAR	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SDM DAN IPEK DAERAH	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
Adanya review Capaian dan Target RPJMD Kabupaten Cirebon	Rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosbud baik di kabupaten, provinsi dan nasional	Tersusunnya pedoman perencanaan tata ruang	Terlaksananya Kegiatan BKPRD Kab. Cirebon dan Keg. RPJUM Keciptakaryaan			Adanya rekomendasi kerjasama antar stakeholder
Target : 1 Dokumen	Target : 3 Dokumen	Target : 4 Dokumen	Target :Perda RTRW	Target :5 Jenis kegiatan			Target :1 Dokumen

<b>KEGIATAN</b>
1. Kegiatan Evaluasi RPJMD (PPTK : IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng)
Dokumen Revisi RPJMD
Target : 1 Dokumen

1. Kegiatan Evaluasi RPJMD (PPTK : IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng)	1. Kegiatan Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah (PPTK : ANTHONY STAUFU, S.Sos., M.Si.) 2. Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (PPTK : IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng) 3. Keg. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid.Ekonomi (PPTK : Moh. FIRDAOS AGH, ST., MM)	1. Kegiatan Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) (PPTK : ASTRI DIANA EKASARI, S.Pi) 2. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan (PPTK : SUPRAPTO, S.STP., M.Si) 3. Keg. Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's (PPTK : SUPRAPTO, S.STP., M.Si) 4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya (PPTK : HJ. MARSITI WAHYUNI, S.Sos)	1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang (PPTK : HOESNI STEVANIA NOOR, S.IP.) 2. Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang (PPTK : HOESNI STEVANIA NOOR, S.IP.)	1. Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang (PPTK : HOESNI STEVANIA NOOR, S.IP.)	1. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan (PPTK : DEDI HERMAWAN, ST., M.Sc)	1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) (PPTK : IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng) 2. Seminar penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bidang pertanian (PPTK : LINA MARLIANA, ST.)	1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah (PPTK :YAYAT RUHYAT, A.Md.)
Dokumen Revisi RPJMD	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Laporan hasil rakor SKPD lingkup bidang ekonomi dan Laporan hasil kunjungan kerja perencanaan program/kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi	Terselenggaranya rapat koordinasi lingkup bidang sosial budaya dan perjalanan dinas keluar daerah	Tersusunnya dokumen profil sosial budaya kabupaten Cirebon	Terkoordinasinya Rancangan Perda tentang Revisi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031	terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi PLKSDA-BM dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang		Laporan hasil rakor investasi tata niaga perberasan, Dokumen kajian investasi tata niaga perberasan, Jumlah peserta diseminasi hasil kajian investasi tata niaga perberasan
Target : 1 Dokumen	Target : 1 Dokumen	Target : 20 OPD, 40 Kecamatan dan 40 kali perjalanan luar daerah	Target : 1 Dokumen	Target : 1 Dokumen	Target : 1 Dokumen	Target : 2 kegiatan	Target : 1 Dokumen
Target : 1 Dokumen	Laporan rakor pengentasan kemiskinan, Dokumen kajian pemetaan kemsiskinan daerah, Jumlah peserta diseminasi hasil kajian pemetaan kemiskinan daerah, Jumlah peserta workshop pemetaan potensi ekonomi, dan pendapatan daerah secara TI.	Dokumen perencanaan pengembangan mangrove	Dokumen analisis sarana dan prasarana pendidikan dasar	Dokumen Kajian Budaya Daerah			Target : 2 laporan, 1dokumen, 100 orang
Target : 2 laporan, 1 dokumen, 100 orang, 10 orang	Target : 1 Dokumen	Dokumen masterplan pembangunan di bidang pemerintahan daerah	Target : 1 Dokumen	Target : 1 Dokumen			Target : 1 Dokumen

<b>PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN</b>
----------------------------------

BIDANG LITBANG	BIDANG EKONOMI	BIDANG SOSIAL BUDAYA	BIDANG FISPR	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Rp 362.987.700	Rp 611.550.000	Rp 857.260.000	Rp 316.445.000	Rp 52.228.000

**POHON KINERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

<b>VISI</b>
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera

<b>RPJMD</b>
MISI 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi

Sasaran Strategis : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih
Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
Target : predikat BAIK

<b>RENSTRA</b>
MISI 3 : Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT

Sasaran Strategis 3.1: Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Sasaran Strategis 3.2 : Tercapainya keselarasan perencanaan
prosentase antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT	
Target : 30%	

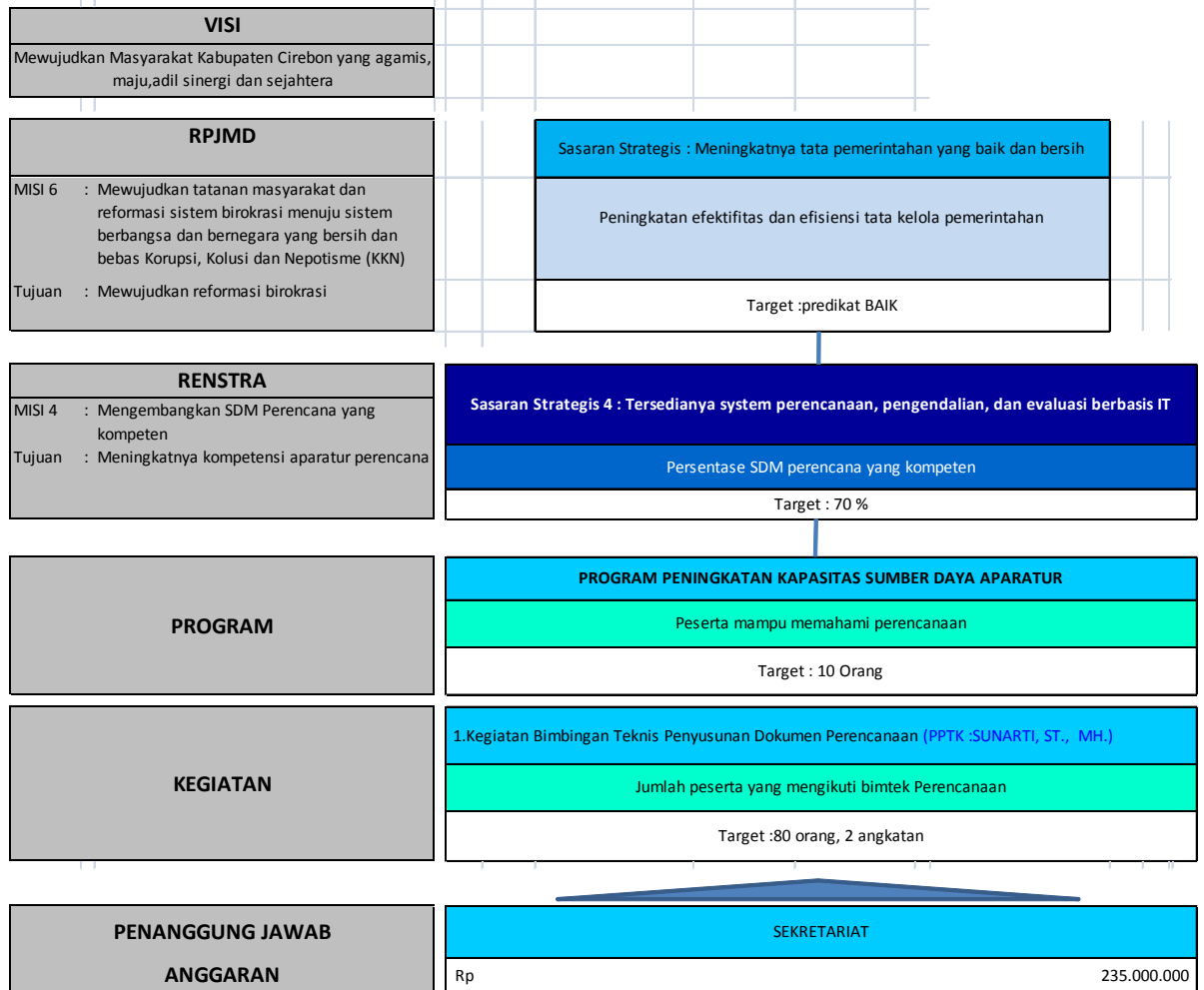
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL</b>	
	Tersedianya sarana data informasi jaringan prasarana utama lainnya berbasis web	Tersajinya data pembangunan / profil daerah utk memudahkan melakukan evaluasi pembangunan Kab.Cirebon	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan	Tersedianya bahan untuk mengevaluasi	Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin	Adanya bahan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Adanya arah pembangunan Kabupaten Cirebon 2018	Adanya arah pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2017	Tersajinya data Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya acuan perencanaan pembangunan dan dok anggaran
	Target : 3 aplikasi			Target : 5 dokmen	Target : 85 %		Target : 75 %		Target : 85 %	

<b>KEGIATAN</b>	1. Kegiatan Peny. dan Pengumpulan Data Infmasi kebutuhan peny. Dok. Perencanaan (PPTK :DEDI HERMAWAN, ST., M.Sc) 2. Kegiatan Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kab.Cirebon (PPTK :SUNARTI, ST., MH.) 3. Kegiatan Peny.Sistem Informasi Pemb.Daerah (SIPD) (PPTK :RACHMAT ATULAH, S.Sos.)			1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaks. Rencana Pemb. Daerah	1. Kegiatan Perjanjian Kinerja ( PPTK :RACHMAT ATULAH, S.Sos.) 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD (PPTK :LINA MARLIANA, ST.) 3. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS ( PPTK :YAYAT RUHIYAT, A.Md) 4. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Perubahan (PPTK :YAYAT RUHIYAT, A.Md) 5. Kegiatan Evaluasi RPJMD (PPTK : IMAMUL HAKIM, ST., M.Eng) 6. Kegiatan Evaluasi AKIP ( PPTK :LINA MARLIANA, ST.)			1. KegiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (PPTK :SUNARTI, ST., MH.)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektorial (PPTK :SUNARTI, ST., MH.)	
	Terbangunnya web data infrastruktur prasarana utama	Update Informasi database pembangunan daerah /profil daerah	Dokumen Pelaporan SIPD dan Bintek	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Dokumen Perkin dan IKU	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen KUA 2018 dan Dokumen PPAS 2018	Dokumen KUA Perubahan 2017, Dokumen PPAS Perubahan 2017	Dokumen LKJP, LPPD, LAKIP SKPD	Dokumen Renstra dan Renja
	Target : 1 website	Target : 40 kecamatan	Target : 1 dokumen dan seluruh OPD/SKPD	Target :4 dokumen	Target : 2 dokumen	Target :1 dokumen	Target : 2 dokumen	Target : 2 dokumen	Target : 2 dokumen	Target : 2 dokumen

<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	BIDANG PE	SEKRETARIAT	BIDANG PE		BIDANG PE	BIDANG LITBANG	BIDANG PE		SEKRETARIAT
	<b>ANGGARAN</b>	Rp 200.329.400	Rp 115.000.000	Rp 83.700.000	Rp 297.046.900	Rp 149.442.500	Rp 167.880.000	Rp 227.117.500	Rp 60.500.000

# POHON KINERJA

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



# **ALUR SASARAN KEGIATAN**

ALUR SASARAN KEGIATAN BAPPELITBANGDA TAHUN 2017

## TABEL ALUR SASARAN DAN KEGIATAN

**DINAS/** : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN**  
**BADAN** : **PENGEMBANGAN DAERAH**  
**TAHUN** : **2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD	75%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen Hasil Musrenbang	1 dok (75 % usulan hasil musrenbang RKPD terakomodir)	731,571,000
					Penetapan RKPD	Dokumen RKPD 2018	1 dok (75 % usulan hasil musrenbang RKPD terakomodir)	378,608,300
					Penetapan RKPD Perubahan	Dokumen perubahan RKPD 2017	1 dok (75 % usulan hasil musrenbang RKPD terakomodir)	76,490,000
2	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	10 dok					
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1 dok	248,600,000

kebijakan dan perencanaan pembangunan.		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan hasil rakor SKPD lingkup bidang ekonomi dan Laporan hasil kunjungan kerja perencanaan program/kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi	1 dok	249,000,000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan rakor pengentasan kemiskinan, Dokumen kajian pemetaan kemiskinan daerah, Jumlah peserta diseminasi hasil kajian pemetaan kemiskinan daerah, Jumlah peserta workshop pemetaan potensi ekonomi, dan pendapatan daerah secara TI.	20 laporan hasil rakor dan 2 laporan kunker	113,950,000
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terselenggaranya rapat koordinasi lingkup bidang sosial budaya dan perjalanan dinas keluar daerah	20 OPD, 40 Kecamatan dan 40 kali perjalanan luar daerah	202,500,000
		Dukungan Manajemen bagi TKPKD	Terlatihnya Aparatur terkait P3BM ( <i>Pro Poor</i>	20 OPD, 40 Kecamatan dan 40 kali perjalanan	258,410,000



				<i>Planning Budgeting and Monitoring)</i>	luar daerah		
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan	1 dok	200,000,000
				Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	Dokumen Strategi Pencapaian SDG's	1 dok	196,350,000
		Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana tata Ruang	Tersosialisasinya Perda tentang Revisi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031	1 dok		157,585,000
			Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Terkoordinasinya Perencanaan Penataan Ruang daerah	2 kegiatan		79,930,000
Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	5 jenis	Program Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi PLKSDA-BM dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	5 jenis		78,910,000
Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	2 dok	Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	Jumlah rakor kerjasama pemb. daerah	4 kali		52,228,000

3	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Jumlah system perencanaan berbasis IT	3 aplikasi	Program Pengembangan Data/Informasi	Peny. dan Pengumpulan Data Infmasi kebutuhan peny. Dok. Perencanaan	Terbangunnya web data infrastruktur prasarana utama	website	983,950,000
					Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kab.Cirebon	Update Informasi database pembangunan daerah /profil daerah	40 kecamatan (1 aplikasi)	115,000,000
					Peny.Sistem Informasi Pemb.Daerah (SIPD)	Dokumen Pelaporan SIPD dan Bintek	1 dokumen dan seluruh OPD/SKPD	200,329,400
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	4 dok	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaks. Rencana Pemb. Daerah	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	4 dokumen	297,046,900
Tercapainya keselarasan perencanaan	1. Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja	85%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perjanjian Kinerja	Dokumen Perkin dan IKU	2 dokumen	149,442,500	
				Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	167,880,000	
		75%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan KUA PPAS	Dokumen KUA 2018 dan Dokumen PPAS 2018	2 dokumen	159,047,500	
				Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Dokumen KUA Perubahan 2017, Dokumen PPAS Perubahan 2017	2 dokumen	76,490,000	

4	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perenc, pelaporan dan evaluasi	10 org	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Perencanaan	80 orang, 2 angkatan	83,700,000

**CASCADE DOWN TAHUN 2017**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON																											
VISI : BAPPELTABANGDA YANG ASPIRATIF, SINERGIS DAN AKUNTABEL BERBASIS IT TAHUN 2019																											
MISI 1 : Mengembangkan sistem perencanaan yang aspiratif			MISI 2 : Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama perencanaan pembangunan				MISI 3 : Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT			MISI 4 : Mengembangkan SDM Perencana yang kompeten																	
TUJUAN 1 : Penyusunan perencanaan yang berdasarkan usulan aspiratif dari masyarakat.			TUJUAN 2 : Menumbuhkembangkan peran dan fungsi koord, fasilitasi dan konsultasi dan kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.				TUJUAN 3 : Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan berbasis IT			TUJUAN 4 : Meningkatkan kompetensi aparatur perencana																	
Sasaran 1.1 : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Sasaran 2.1 : Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.				Sasaran 3.1 : Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT			Sasaran 4.1 : Tersedianya SDM perencana yang kompeten																	
1.1.1 Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD			2.1.1 Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan				Sasaran 3.2 : Tercapainya keselarasan perencanaan																				
			2.1.2 Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan				Sasaran 3.3 : Tersedianya data yang valid dan akurat																				
			2.1.3 Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan				prosentase antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis IT																				
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI			KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA			KEPALA BIDANG EKONOMI			KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA			SEKRETARIS												
2.1.3.1 Rakor Kerjasama Pembangunan Daerah			2.1.1.10 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031			2.1.1.11 Dokumen Daya Saing Daerah			2.1.1.4 Evaluasi RPJMD			2.1.1.8 Hasil Rakor Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya			1.1.1 Jumlah usulan musrenbang RKPD												
3.2.1 Presentase Laporan Perencanaan pembangunan (100%)			2.1.1.11 Hasil Rakor tentang Rencana Tata Ruang			2.1.1.12 Dokumen Perencanaan pengembangan ekonomi			2.1.1.5 SAKIP / AKIP			2.1.1.9 Dokumen Profil Sosial Budaya			4.1.1 Persentase SDM perencana yang kompeten												
3.3.1 Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (100%)			2.1.2.1 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat			2.1.1.13 Hasil Rakor Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi masyarakat			2.1.1.6 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			2.1.1.10 Dok. analisis sarana dan prasarana pendidikan dasar			0.0.0 Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan (60 %)												
									2.1.1.7 Penguatan SIDA			2.1.1.11 Dokumen Analisis sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar			0.0.0 Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (100%)												
												2.1.1.12 Dokumen Masterplan pembangunan di bidang pemerintahan															
												2.1.1.13 Dokumen Kajian Budaya Daerah															
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI KINERJA PERENCANAAN		KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PERENCANAAN		KEPALA SUB BIDANG PERUMAHAN, PEMUKIMAN, PERTANAKAN LH		KEPALA SUB BIDANG PU, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN		KEPALA SUB BIDANG PANGAN, PERTANAKAN DAN PERIKANAN		KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI JASA DAN PARAWISATA		KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KEWILAYAHAN		KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI		KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA DAN CLAHIRAGA		KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
3.2.1.1 Jumlah Dokumen Pelaporan SIPD dan Birek (1 dokumen dan seluruh OPD/SKPD)		1.1.1.1 Jumlah dokumen Penetapan RKPD (1 dok)		2.1.1.1 Jumlah Kegiatan BKPRD Kab. Cirebon dan Keg. RPUM Keciprakarya (2 kegiatan)		2.1.1.2 Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang yang disosialisasi-kan (1 perda)		2.1.1.4 Dok.Perencanaan n pengembangan ekonomi (1 dok)		2.1.1.5 Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi (1 dokumen)		2.1.1.6 Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon		2.1.1.9 Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon		2.1.1.11 Jumlah Rakor Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya		2.1.1.12 Jumlah Dokumen RADPPK (1 dokumen)		2.1.1.14 Jumlah sosialisasi dan diseminasi strategi pencapaian SDG's		1.1.1.3 Jumlah dokumen musrenbang RKPD (1 dokumen)		0.0.0 Prosentase Data Aset yang Valid (60%)		0.0.0 Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (60%)	
3.2.1.2 Jumlah dokumen IKU dan Perangitan kinerja (2 dokumen)		1.1.1.2 jml dok. Penetapan RKPD Perubahan (1 dokumen)		3.1.1 Terbangunnya web data infrastruktur prasarana utama (1 aplikasi)		2.1.1.3 Hasil Rakor Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan				2.1.1.7 Hasil rumusan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat		2.1.1.10 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)				2.1.1.13 Rumusan hasil rakor tim TKPKD dalam pengentasan kemiskinan daerah		2.1.1.15 Rumusan hasil kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG		3.1.2 Update Informasi database pembangunan daerah (/profil daerah (40 kec, 1 aplikasi)		0.0.0 Persentase Terselaskannya ya Dok. Lap/ Keuangan Tepat Waktu (100 %)		0.0.0 Persentase Fasilitas Layanan Administrasi Kantor Tepat Waktu (60%)			
3.3.1.1 Persentase terselesakannya dok. Lap. Movev Program dan Kegiatan (100 %)		3.2.1.4 Persentase Peny. Dokumen Perencanaan (100 %)				2.1.2.1 Jumlah fasilitas perencanaan dan pemanfaatan ruang (1 kegiatan)				2.1.1.8 Jumlah dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)										3.3.1.3 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (1 dokumen)		0.0.0 Persentase Penyelesaian Pencairan Tepat Waktu (70%)		0.0.0 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (60%)			
3.3.1.2 Persentase Peny. Dok. Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu (100 %)		3.2.1.5 Jumlah Dokumen KUA 2018 dan Dokumen PPAS 2018 (2 dokumen)																		4.1.1 Jumlah peserta yang mengikuti birek Perenc. (80 orang, 2 angkatan)		0.0.0 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan (80 %)		0.0.0 Persentase Kejuasaan Pegawai Terhadap Layanan Kepegawaian (85 %)			
		3.2.1.6 Jumlah Dok. KUA Perub. 2016, Dok. PPAS Perubahan 2016 (2 dok.)																		0.0.0 Persentase Peny. Dok. Laporan Capaian Kinerja (100 %)							
		3.2.1.7 Hasil koordinasi kerjasama pemb.daerah (1 dok)																		0.0.0 Persentase Peny.Dok.Perencanaan (100 %)							

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Prosentase terakomodasinya usulan musrenbang dalam RKPD	persen	70	98,63	80	97,77
2.	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	Rumusan kebijakan	14	15	10	10
		Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	6	1	1
		Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	Dokumen	2	2	1	1
3.	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Jumlah system perencanaan berbasis IT	Aplikasi	3	3	3	3
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	Dokumen	6	7	4	6
4.	Tercapainya keselarasan perencanaan	Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja	Persen	80	100	85	100
		Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program	Persen	70	100	75	100
5.	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Orang	10	80	40	151

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Prosentase terakomodasinya usulan musrenbang dalam RKPD	persen	70	98,63	80	97,77
2.	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	Rumusan kebijakan	14	15	10	10
		Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	6	1	1
		Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	Dokumen	2	2	1	1
3.	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Jumlah system perencanaan berbasis IT	Aplikasi	3	3	3	3
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	Dokumen	6	7	4	6
4.	Tercapainya keselarasan perencanaan	Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja	Persen	80	100	85	100
		Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program	Persen	70	100	75	100
5.	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Orang	10	80	40	151

**PENILAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama	Bobot (Hasil FGD, Prioritas SKPD)	Target	Realisasi Akhir Tahun	Skor (Jika Maks : Realisasi/Target x 100 & Jika Min Target/Realisasi x 100)	Skor Akhir (Skor x Bobot/100)
1.	Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Prosentase terakomodirnya usulan musrenbang dalam RKPD	<i>Jumlah Pagu Indikator Kewilayahan (PIK) hasil Musrenbang RKPD berbanding Jumlah PIK yang terakomodir dalam RKPD</i>	20	80	97,77	122,21	24,44
2.	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	Hasil rakor yg berisi rumusan kebijakan dalam proses perencanaan Pembangunan	10	10	10	100	10
		Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan	Fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalam proses perenc. Pembangunan	10	1	1	100	10
		Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan	Dokumen kerjasama antar daerah maupun perbatasan	5	1	1	100	5
3.	Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT	Jumlah system perencanaan berbasis IT	Jml Sistem Inf. dalam proses perencanaan	10	3	3	100	10
		Jml dokumen evaluasi perenc. pembangunan	Jml dokumen evaluasi perenc. pembangunan	15	4	6	150	22,5
4.	Tercapainya keselarasan perencanaan	Prosentase Jumlah program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja	Jml Prog.Keg. yg tercantum di Renja dibagi dg yg tercantum dalam RKPD dikali 100	10	85	100	117,65	11,76
		Prosentase Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program	Jml dok.perenc. yg digunakan sbg acuan peny. program dibagi seluruh dok. perenc. yang dihasilkan dikali dengan 100	10	75	100	133,33	13,33
5.	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perenc.. pelaporan dan evaluasi	10	40	151	377,5	3.775
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>				<b>3.863.03</b>

LAPORAN  
**EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH**  
TAHUN ANGGARAN 2017

BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2018



**EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

SATUAN KERJA PERANGKAT IMPIRAH		BAPPALITBANGDA														
SASARAN STRATEGIS		KESATU														
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA										TARGET KINERJA (%)				REALISASI (%)
												TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		Presentase terakomodirnya usulan masyarakat dalam RKPD											80%		97,77%	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KELUATAN	REALISASI ANGGARAN (%)					JML		
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	(%)			
1	Mendorong kemampuan yang luas kepada semua pihak dalam perencanaan pembangunan yang pro-rakyat	√	√	-	√	Dokumen kompilasi Perencanaan Pembangunan Kab.Cirebon Tahun 2016	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Musrenbang RKPD	84%	10%	-	-	94%			
		√	√	√	√	Dokumen RKPD 2018		Pencapaian RKPD	3%	42%	3%	3755	81%			
			√	√	√	Dokumen perubahan RKPD 2017		Pencapaian RKPD Perubahan			3%	9245	91%			

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAPPELITBANGDA  
 SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET				REALISASI			
						TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				
Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.		Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan				-	-	-	10	10			
		Jumlah fasilitasi perencanaan yang dilaksanakan				-	-	-	1 keg	1 keg			
		Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dihasilkan				-	-	-	1 dok	1 dok			
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (%)				JML
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	(%)
1	Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih kredibel berdasarkan hasil kajian bappeda	√	√	√	√	Terpadunya Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan dan Pemetaan Kawasan Kumuh Kab.Cirebon	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	1%	19%	3%	74%	97%
		√	√	√	-	Buku Kajian Green Economy		Peny.perencanaan pengembangan ekonomi masy.	1%	0%	1%	87%	88%
		√	√	√	√	Laporan Hasil Rakor Bidang Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koord.Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	26%	18%	38%	15%	97%
		√	√	√	√	Buku Masterplan Pembangunan Ekonomi Sektor Informal		Peny.masterplan pembangunan ekonomi	-	5%	0%	89%	94%
		√	√	√	√	1. Lap.Hasil Rakor OPD Lingkup Bid.Sosbud; 2. Lap. Hasil Perjalanan Dalam Daerah Terkait Pelaksanaan Program/ Kegiatan OPD Lingkup Bid.Sosbud; 3. Lap.Hasil Seminar Pemb.Terkait Isu Strategis Lingkup Sosbud; 4. Laporan Hasil Pelaksanaan Forum CSR.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	10%	31%	13%	33%	88%
		-	√	√	√	1. Terlatihnya Aparatur Terkait P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring); 2. Lap.Hasil Rakor Pengentasan Kemiskinan; 3. Lap.Hasil Sosialisasi Capaian Pengentasan Kemiskinan Tahun Lalu; 4. Lap.Hasil Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Tahun 2017; 5.Lap.Hasil Perjalanan dlm Daerah Terkait Prog./Kegiatan OPD dlm Pengentasan Kemiskinan.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Dukungan manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	1%	40%	1%	45%	87%
		√	√	√	√	1. Dokumen Strategi Pencapaian SDGs Kabupaten Cirebon; 2.laporan Hasil Sosialisasi dan Diseminasi Target SDGs.		Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	-	-	-	94%	94%
		-	√	√	√	Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan di Kab.Cirebon		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	93%	93%
		√	√	-	-	Meningkatnya Peran Serta Masy. dlm Pemanfaatan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Sos.Peraturan PerUU tentang rencana tata ruang	-	0.2%	5%	66%	71%
		√	√	√	√	Terkoordinasinya Perencanaan Penataan Ruang Daerah		Rapat Koori.tetg Rencana Tata Ruang	22%	15%	12%	51%	100%
2	Mendorong koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengembangan perencanaan berdasarkan tematik	√	√	√	√	Meningkatnya Peran Serta Masy. dalam Pemanfaatan Ruang	Prog.Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi peningkatan peran serta masy.	0.2%	45.8%	11.8%	42.1%	100%
		-	-	-	√	Jumlah rakor kerjasama pembangunan daerah	Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	-	-	-	62%	62%

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAPPELITBANGDA  
 SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET				REALISASI			
						TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				
Tersedianya system perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berbasis IT.		Jumlah system perencanaan berbasis IT				-	-	-	3 aplikasi	3 aplikasi			
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan				-	-	-	4 dok	6 dok			
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (%)				JML (%)
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
1	Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis Teknologi Informasi	√	√	√	√	1. Updating Data Pokok Infrastruktur (Jaringan Prasarana Utama dan Lainnya) di Kabupaten Cirebon; 2. Updating Sistem Data Pokok Tata Ruang; 3. Tersusunnya Rencana Pembangunan Infrastruktur Sektor Jalan dan Jembatan; 4. Dokumen pra studi kelayakan pelabuhan kabupaten Cirebon; 5. Dokumen Studi Kelayakan pelabuhan kabupaten Cirebon	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	0.6%	33%	0.1%	64%	98%
		-	√	-	-	Update Informasi database pembangunan daerah / profil daerah		Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kab.Cirebon	-	56%	-	41%	98%
		√	√	√	√	Dokumen Pelaporan SIPD dan Bintek		Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	2%	2%	6%	70%	80%
		√	√	√	-	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2%	3%	13%	59%	77%
		√	√	√	-	Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2016		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	96%	-	-	-	96%
		√	√	√	-	Dokumen Evaluasi dan Rancangan Perda Perubahan RPJMD		Evaluasi RPJMD	1%	4%	3%	6%	14%

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAPPELITBANGDA  
 SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET				REALISASI			
						TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				
Tercapainya keselarasan perencanaan		prosentase program dan kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan renja				-	-	-	90%	100%			
		prosentase dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan penyusunan program				-	-	-	80%	100%			
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (%)				JML (%)
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
1	Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis Teknologi Informasi	√	√	√	√	Dokumen Perkin dan IKU	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perjanjian Kinerja	0.00%	24.94%	0.00%	74.86%	99.80%
		√	√	√	-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	53.73%	5.77%	40.33%	0.00%	99.83%
		-	√	√	-	Dokumen KUA 2018 dan Dokumen PPAS 2018		Penyusunan KUA PPAS	0.00%	18.37%	52.07%	0.00%	70%
		-	-	√	-	Dokumen KUA Perubahan 2017, Dokumen PPAS Perubahan 2017		Penyusunan KUA PPAS Perubahan	0.00%	0.00%	94.54%	0.00%	95%

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAPPELITBANGDA  
 SASARAN STRATEGIS : KELIMA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET				REALISASI			
						TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				
Tersedianya SDM perencana yang kompeten		Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi						40 org		151 ORANG			
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (%)				JML (%)
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	
1	Pengembangan SDM dilingkungan melalui berbagai diklat untuk menghasilkan SDM yang lebih profesional	-	√	√	-	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Perencanaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen	-	-	34%	64%	98%

**LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON**

No	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI		SISA DPPA 2017		PENJELASAN SISA DPPA 2017	KPA	PPTK
				Rp	%	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>URUSAN WAJIB</b>								
		<b>URUSAN PENATAAN RUANG</b>	316,425,000	270,896,300	85.61%	45,528,700	14.39%			
	1.03.4.01.06.35	Program Perencanaan Tata Ruang	237,515,000	192,152,900	80.90%	45,362,100	19.10%			
	1.03.4.01.06.35.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	157,585,000	112,611,500	71.46%	44,973,500	28.54%	Total yang tidak diserap Rp 44.973.500,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 700.000); Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan (Rp62.000); Honorarium/Uang Saku/ Pengganti Transport Peserta Kegiatan (Rp 5.973.000); Belanja Cetak (Rp. 30.000.000,-), Belanja makan minum rapat (Rp. 384.000,-), Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 654.500,-), dan Belanja jasa tenaga ahli Instruktur/Narasumber PNS (Rp. 6.800.00,-)	UUS SUDRAJAT, ST	HOESNI STEVANIE NOOR, S.IP.
	1.03.4.01.06.35.10	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	79,930,000	79,541,400	99.51%	388,600	0.49%	Total yang tidak diserap Rp 388.600,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 388.600,-)	UUS SUDRAJAT, ST	HOESNI STEVANIE NOOR, S.IP.
	1.03.4.01.06.36.	Program Pemanfaatan Ruang	78,910,000	78,743,400	99.79%	166,600	0.21%			
	1.03.4.01.06.36.04.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	78,910,000	78,743,400	99.79%	166,600	0.21%	Total yang tidak diserap Rp 166.600,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 91.600,-) dan efisiensi Belanja jasa konsultasi perencanaan (Rp.75.000,-)	UUS SUDRAJAT, ST	HOESNI STEVANIE NOOR, S.IP.
		<b>URUSAN PERENCANAAN</b>	3,026,855,000	2,760,988,791	91.22%	265,866,209	8.78%			
1	4.01.06.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,872,703,000	1,624,277,791	86.73%	248,425,209	13.27%			
	4.01.06.4.01.06.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262,200,000	117,893,104	44.96%	144,306,896	55.04%	Total yang tidak diserap Rp 144.306.896,- terdiri dari : Belanja Telepon (Rp. 38,986,460,-) Belanja Air (Rp.148.400,-) Belanja Listrik (Rp. 105,172,036,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	11,000,000	8,117,400	73.79%	2,882,600	26.21%	Total yang tidak diserap Rp 2,882,600,- terdiri dari : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (Rp.882,600,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si

4.01.06.4.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	29,880,000	99.60%	120,000	0.40%	Total yang tidak diserap Rp 120.000,- terdiri dari : Belanja Jasa Upah Tukang/Mandor?Juru Laden/Petugas Kebersihan (Rp. 120.000,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
4.01.06.4.01.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	54,250,000	54,250,000	100.00%	-	0.00%		SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
4.01.06.4.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66,500,000	66,393,000	99.84%	107,000	0.16%	Total yang tidak diserap Rp. 107.000,- terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor (Rp. 107.000,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
4.01.06.4.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,200,000	23,200,000	100.00%	-	0.00%		SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
4.01.06.4.01.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	14,000,000	14,000,000	100.00%	-	0.00%		SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
4.01.06.4.01.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,051,255,000	1,022,191,400	97.24%	29,063,600	2.76%	Total yang tidak diserap Rp. 29,063,600,- terdiri dari : Belanja Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp. 8.100.000,-) Belanja Penjilidan (Rp. 270.000,-) Dan sisa belanja modal lainnya terdiri dari : Belanja Modal Pengadaan papan Visual elektronik (Rp. 250.000,-) Belanja Modal Pengadaan AC Split/Pendingin Ruangan (Rp. 1.600.000,-) Belanja Modal Pengadaan Teralis Besi (Rp. 402.000,-) Belanja Modal Pengadaan Printer (Rp. 400.000,-) Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display (Rp. 1.800.000,-) Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (Rp. 1.200,-) Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat (Rp. 300.000,-) Belanja Modal Pengadaan Meja Resepsionis (Rp. 1.034.700,-) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (Rp. 50.000,-) Belanja Pengadaan Kursi Rapat (Rp.2.000,-) Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu (Rp. 28.700,-) Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat ( Rp. 17.500.000,-) Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas dan Perlengkapannya (Rp. 100.000,-) Belanja Modal Kompor gas (Rp. 100.000,-) Belanja Modal Pembelian Kamera (Rp. 200.000,-) Belanja Modal Pembelian Proyektor ( Rp. 1.200.000,-) Belanja Modal Sound Sistem (Rp. 200.000,-) Belanja Modal Wireless (Rp. 225.000,-) Belanja CCTV (Rp. 300.000,-) ada sisa pagu anggaran sebesar (Rp. 4.900.000,-) pada Belanja Modal Pengadaan Scanner	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si

	4.01.06.4.01.06.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,600,000	63,600,000	100.00%	0	0.00%		SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44,898,000	41,155,500	91.66%	3,742,500	8.34%	Total yang tidak diserap Rp. 3,742,500,- terdiri dari : Belanja Surat Kabar/majalah (Rp. 3,742,500,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	54,000,000	49,000,000	90.74%	5,000,000	9.26%	Total yang tidak diserap Rp. 5,000,000,- terdiri dari : Belanja makanan dan Minuman Tamu (Rp. 5,000,000,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	197,800,000	134,597,387	68.05%	63,202,613	31.95%	Total yang tidak diserap Rp. 63,202,613,- terdiri dari : Belanja Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp.202,613,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
2	4.01.06.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	764,652,000	754,766,000	98.71%	9,886,000	1.29%			
	4.01.06.4.01.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	606,000,000	597,500,000	98.60%	8,500,000	1.40%	Total yang tidak diserap Rp. 8,500,000,- terdiri dari : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Rp.4,200,000,-) Belanja Pengisian Tabung Gas (Rp.3,050,000,-) Belanja Penjilidan (Rp. 90,000,-) Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor (Rp. 1.160,000,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113,652,000	112,266,000	98.78%	1,386,000	1.22%	Total yang tidak diserap Rp. 1.386.000,- terdiri dari : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Rp.1.386,000,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	100.00%	-	0.00%	Total yang tidak terserap Rp. 0	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	20,000,000	20,000,000	100.00%	-	0.00%	Total yang tidak terserap Rp. 0	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si

3	4.01.06.4.01.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80,000,000	78,625,000	98.28%	1,375,000	1.72%			
	4.01.06.4.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	60,000,000	58,625,000	97.71%	1,375,000	2.29%	Total yang tidak diserap Rp. 1.375.000,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa (Rp.900,000) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (Rp.475.000,-)	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20,000,000	20,000,000	100.00%	-	0.00%		SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
4	4.01.06.4.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235,000,000	231,400,000	98.47%	3,600,000	1.53%			
	4.01.06.4.01.06.05.12	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	235,000,000	231,400,000	98.47%	3,600,000	1.53%	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp900.000,- ; efisiensi jasa travel Rp 500.000,- ; honorarium narasumber tidak hadir Rp 2.200.000,-	SURATMO, S.Sos., M.Si	SUNARTI, ST., MH.
5	4.01.06.4.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,000,000	55,420,000	95.55%	2,580,000	4.45%			
	4.01.06.4.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,000,000	43,100,000	97.95%	900,000	2.05%	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 900,000,-	SURATMO, S.Sos., M.Si	SUNARTI, ST., MH.
	4.01.06.4.01.06.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,000,000	6,160,000	88.00%	840,000	12.00%	uang lembur PNS Rp 420.000,- mamin lembur Rp 420.000,-	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
	4.01.06.4.01.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,000,000	6,160,000	88.00%	840,000	12.00%	uang lembur PNS Rp 420.000,- mamin lembur Rp 420.000,-	SURATMO, S.Sos., M.Si	SRI GIANTI, S.Psi., M.Si
6	4.01.06.4.01.06.07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100.00%	-	0.00%			
	4.01.06.4.01.06.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	16,500,000	16,500,000	100.00%	-	0.00%		SURATMO, S.Sos., M.Si	SUNARTI, ST., MH.



7	4.01.4.01.06.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	1,384,279,400	1,325,724,100	95.77%	58,555,300	4.23%			
	4.01.4.01.06.15.02.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	983,950,000	969,737,900	98.56%	14,212,100	1.44%	Total yang tidak diserap Rp 14.212.100,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp3.150.000); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp94.600,-); dan efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pelabuhan Kabupaten Cirebon (Rp10.967.500,-).	UUS SUDRAJAT, ST	DEDI HERMAWAN, ST., M.Sc
	4.01.4.01.06.15.12.	Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon	200,000,000	195,080,000	97.54%	4,920,000	2.46%	Total yang tidak diserap Rp 5.820.000,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp1.800.000); Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan (Rp 3.075.000); Honorarium/Uang Saku/ Pengganti Transport Peserta Kegiatan (Rp 600.000); efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen (Rp 345.000).	SURATMO, S.Sos., M.Si	SUNARTI, ST., MH.
	4.01.4.01.06.15.22.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	200,329,400	160,906,200	80.32%	39,423,200	19.68%	Total yang tidak diserap Rp 39.423.200,- terdiri dari : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rp 38.850.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 273.200,-); dan efisiensi Belanja Jasa EO (Rp 300.000,-).	DADANG JUNAEDI, ST	RACHMAT ATULAH, S.Sos
8	4.01.4.01.06.16.	Program Kerjasama Pembangunan	52,228,000	32,578,000	62.38%	19,650,000	37.62%			
	4.01.4.01.06.16.08.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah	52,228,000	32,578,000	62.38%	19,650,000	37.62%	Total yang tidak diserap Rp 19.650.000,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 500.000,-);Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rp 2.500.000,-); Belanja Mamin Rapat (Rp 4.000.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 2.100.000,-); Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS (Rp 10.000.000,-) dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS (Rp 550.000,-)	DADANG JUNAEDI, ST	YAYAT RUHIYAT, A.Md

9	4.01.4.01.06.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	350,000,000	340,088,900	97.17%	9,911,100	2.83%			
	4.01.4.01.06.19.09.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	350,000,000	340,088,900	97.17%	9,911,100	2.83%	Total yang tidak diserap Rp 9.911.100,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 728.600,-); dan efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen (Rp 9.182.500,-).	UUS SUDRAJAT, ST	DEDI HERMAWAN, ST., M.Sc
10	4.01.4.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,507,969,700	2,075,563,870	82.76%	432,405,830	17.24%			
	4.01.4.01.06.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	731,571,000	689,447,600	94.24%	42,123,400	5.76%	Total yang tidak diserap Rp 42.123.400,- terdiri dari : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Rp 20.350.000,-); Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp1.000.000,-); Honorarium/Uang Saku (Rp 6.825.000,-); Belanja BBM/Gas (Rp 2.092.500,-); Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rp 350.000,-); Belanja Mamin Rapat (Rp 6.000.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 255.900,-); Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS (Rp 2.100.000,-) dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS (Rp 3.150.000,-)	DADANG JUNAEDI, ST	YAYAT RUHIYAT, A.Md
	4.01.4.01.06.21.10	Penetapan RKPD	335,508,300	282,685,600	84.26%	52,822,700	15.74%	Total yang tidak diserap Rp 52.822.700,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 2.700.000,-); Uang Lembur PNS (Rp 4.080.000); Uang Lembur PNS (Rp 420.000); Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rp 1.200.000,-); Belanja Mamin Rapat (Rp 9.600.000,-); Belanja Mamin Lembur (Rp 2.688.000,-); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 134.700,-); dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS (Rp 32.000.000,-)	DADANG JUNAEDI, ST	YAYAT RUHIYAT, A.Md
	4.01.4.01.06.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	189,313,500	181,813,500	96.04%	7,500,000	3.96%	Total yang tidak diserap Rp 7.500.000,- , terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 1.500.000,-) dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 6.000.000,-)	DADANG JUNAEDI, ST	RACHMAT ATULAH, S.Sos

4.01.4.01.06.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	260,046,900	198,101,500	76.18%	61,945,400	23.82%	Total yang tidak diserap Rp 61.945.400,-, terdiri dari : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rp 36.750.000,-); Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 600.000,-); Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Rp 18.000.000,-); Belanja Penggandaan (Rp 6.000.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 595.400,-)	DADANG JUNAEDI, ST	RACHMAT ATULAH, S.Sos
4.01.4.01.06.21.14	Perjanjian Kinerja	149,442,500	149,142,500	99.80%	300,000	0.20%	Total yang tidak diserap Rp 300.000,-, terdiri dari : efisiensi Belanja Jasa EO (Rp 300.000,-).	DADANG JUNAEDI, ST	RACHMAT ATULAH, S.Sos
4.01.4.01.06.21.20	Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	167,880,000	167,594,670	99.83%	285,330	0.17%	sisa sppd dalam daerah	TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si	LINA MARLIANA, ST.
4.01.4.01.06.21.21	Evaluasi RPJMD	245,600,000	33,429,800	13.61%	212,170,200	86.39%	pekerjaan untuk penyusunan rancangan perubahan RPJMD tidak bisa dilaksanakan karena terkait dengan keluarnya permendagri No. 86 tahun 2017 pasal 342 ayat 2 : Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila: a). sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b). sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.	TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si	IMAMMUL HAKIM, ST., M.Eng
4.01.4.01.06.21.32	Penetapan RKPD Perubahan	76,490,000	72,165,000	94.35%	4,325,000	5.65%	Total yang tidak diserap Rp 4.325.000,-, terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 500.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 3.825.000).	DADANG JUNAEDI, ST	YAYAT RUHIYAT, A.Md
4.01.4.01.06.21.33	Penyusunan KUA PPAS	159,047,500	112,023,700	70.43%	47,023,800	29.57%	Total yang tidak diserap Rp 47.023.800,-, terdiri dari : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rp 1.200.000,-); Honorarium Tim Pengadaan Barjas (Rp 1.900.000,-); Uang Lembur PNS (Rp 3.672.000,-); Uang Lembur Non PNS (Rp 252.000,-); Belanja Sewa Ruang Rapat (Rp 38.400.000); Belanja Mamin Lembur (Rp 1.344.000); dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 255.800,-)	DADANG JUNAEDI, ST	YAYAT RUHIYAT, A.Md
4.01.4.01.06.21.34	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	68,070,000	64,350,000	94.54%	3,720,000	5.46%	Total yang tidak diserap Rp 3.720.000 terdiri dari: Belanja ATK (Rp 220.000,-); Belanja Sewa Ruang Rapat (Rp 2.000.000,-); dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 1.500.000,-)	DADANG JUNAEDI, ST	YAYAT RUHIYAT, A.Md

	4.01.4.01.06.21.62	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	125,000,000	124,810,000	99.85%	190,000	0.15%	Total yang tidak diserap Rp. 190.000 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah (Rp. 25.000,-) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Rp. 165.000,-)	TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si	LINA MARLIANA, ST.
11	4.01.4.01.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	762,950,000	705,503,215	92.47%	57,446,785	7.53%			
	4.01.4.01.06.22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	400,000,000	375,219,950	93.80%	24,780,050	6.20%	Total yang tidak diserap Rp 24.780.050,- terdiri dari : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Rp900.000); Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp16.662.050,-); efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masterplan Pembangunan Ekonomi Sektor Informal (Rp 4.518.000,-); Belanja jasa narasumber PNS (Rp. 1.700.000,-); dan Belanja jasa narasumber non PNS (Rp. 1.000.000,-)	AGUS WALUYO HADI, S.Sos	ANTHONY SYAUFANA, S.Sos., M.Si.
	4.01.4.01.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	249,000,000	220,142,000	88.41%	28,858,000	11.59%	RTL: Solusi ekonomi hijau dengan sektor yang spesifik : Perusahaan berbasis keanekaragaman hayati yang dikelola oleh masyarakat daerah; Bisnis berbasis keanekaragaman hayati di masa depan; Ekowisata lintas batas; Sektor-sektor hijau yang inovatif; Menghijaukan sektor-sektor berdampak tinggi. Solusi ekonomi hijau lintas sektor: Perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang bersifat partisipatif; Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; Memperluas jaringan kawasan lindung dan meningkatkan konektivitas	TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si	IMAMMUL HAKIM, ST., M.Eng
	4.01.4.01.06.22.04.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	113,950,000	110,141,265	96.66%	3,808,735	3.34%	Total yang tidak diserap Rp 3.808.735,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp 308.735,-); dan Belanja jasa narasumber PNS (Rp. 3.500.000,-)	AGUS WALUYO HADI, S.Sos	Moh. FIRDAOS AGIH, ST., MM
12	4.01.4.01.06.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1,707,260,000	1,470,090,300	86.11%	237,169,700	13.89%			
	4.01.4.01.06.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	202,500,000	178,323,000	88.06%	24,177,000	11.94%	Efisiensi penjiilidan Perbup tentang Pedoman Desa Sejahtera, uang saku sosialisasi Perbup, SPPD Luar Daerah karena terbentur dengan keterbatasan pagu pencairan tiap triwulan	AGUNG GUMILANG, SS, M.Si	Hj. MARSITI WAHYUNI, S.Sos

4.01.4.01.06.23.54	Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	258,410,000	249,736,000	96.64%	8,674,000	3.36%	1. Efisiensi honorarium panitia pengadaan barjas, karena nilai kontraknya dibawah 50jt; 2. Efisiensi belanja ATK, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan belanja jasa narasumber PNS; 3. Sisa penawaran belanja jasa konsultasi	AGUNG GUMILANG, SS, M.Si	ASTRI DIANA EKASARI, S.Pi
4.01.4.01.06.23.55	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	200,000,000	185,896,000	92.95%	14,104,000	7.05%	Adanya efisiensi anggaran dari hasil seleksi sederhana di ULP untuk pekerjaan kajian Penyusunan RAD Penanggulangan kemiskinan	AGUNG GUMILANG, SS, M.Si	SUPRAPTO, S.STP., M.Si
4.01.4.01.06.23.57	Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	196,350,000	184,945,000	94.19%	11,405,000	5.81%	Adanya efisiensi anggaran dari hasil seleksi sederhana di ULP untuk pekerjaan kajian Penyusunan RAD Sustainable Development Goals	AGUNG GUMILANG, SS, M.Si	SUPRAPTO, S.STP., M.Si
4.01.4.01.06.23.61	Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG	750,000,000	583,100,300	77.75%	166,899,700	22.25%	1. Pengadaan Barjas dibawah Rp. 50jt sehingga honorarium Tim Pengadaan Barjas tidak di serap; 2. Honorarium non PNS untuk petugas updating data KM 0 Pro Poor hanya terserap 80% berdasarkan progress kerja, idealnya waktu yang dibutuhkan untuk updating data KM 0 Pro Poor di desil 1 sebanyak 72.385 KRTS adalah 3-4 bulan, karena dana transfer dari propinsi terlambat sehingga waktu pelaksanaan hanya 1,5 bln disamping faktor cuaca, akses jalan yang sulit, trouble teknis pada aplikasi, dan waktu pelaksanaan updating data di akhir tahun berbenturan dengan tugas pokok petugas updating data KM 0 Pro Poor sehingga progress kerja s/d waktu yang ditentukan hanya 80% dari jumlah total KRTS yang seharusnya terupdate; 3. Efisiensi penggunaan ATK, Penggandaan, Penjilidan ; 4. Efisiensi belanja sewa kamar hotel, karena biaya akomodasi narasumber pada pelatihan P3B ditanggung sepenuhnya oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan); 5. Efisiensi Belanja perjalanan dinas luar daerah. 6. Efisiensi honor narasumber (kebijakan TNP2K yang menugaskan 1 orang per hari untuk menjadi narasumber di daerah).	AGUNG GUMILANG, SS, M.Si	ASTRI DIANA EKASARI, S.Pi
4.01.4.01.06.23.62	Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon	100,000,000	88,090,000	88.09%	11,910,000	11.91%	Efisiensi anggaran dari penjilidan lap akhir/tahunan dan lap periodik CSR, perijinan dinas luar daerah, belanja narasumber PNS, FGD Tim Fasilitasi TJSL	AGUNG GUMILANG, SS, M.Si	Hj. MARSITI WAHYUNI, S.Sos

		URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200,000,000	159,255,522	79.63%	40,744,478	20.37%			
4.04.4.01.06.15		Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	200,000,000	159,255,522	79.63%	40,744,478	20.37%			
4.04.4.01.06.15.05		Seminar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	100,000,000	85,085,522	85.09%	14,914,478	14.91%	Total yang tidak diserap Rp 14,914,478,- terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rp 14,050,000); dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp. 864,478)	TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si	LINA MARLIANA, ST.
4.04.4.01.06.15.06		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100,000,000	74,170,000	74.17%	25,830,000	25.83%	Program prioritas yang perlu dilakukan: 1). Penyusunan dan penetapan regulasi; 2) peningkatan kualitas SDM; 3). Pembentukan dan pembinaan kelembagaan; 4). Pemberdayaan masyarakat; 5). Fasilitasi permodalan pemasaran; 6). Penyusunan pola insentif dan penjaminan usaha 7). penyediaan infrastruktur; 8). penguatan jejaring kerja	TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si	IMAMMUL HAKIM, ST., M.Eng
		Jumlah	10,307,967,100	9,140,688,998	88.68%	1,167,278,102	11.32%			